

## VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

**R**encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang diharapkan akan dapat dicapai pada tahun 2025 mendatang. Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini ditetapkan berdasarkan cita-cita, aspirasi, dan keinginan masyarakat Kota Solok secara keseluruhan, dengan memperhatikan juga prediksi kondisi umum daerah untuk masa 20 tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025* dan memperhatikan *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat* untuk periode yang sama.

### IV.1 VISI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi pembangunan kota, pada dasarnya, merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kota Solok pada 20 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat Kota Solok yang diperoleh melalui penjarangan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Di samping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan kondisi umum daerah dewasa ini dan prediksi untuk 20 tahun mendatang. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini, merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh seluruh warga Kota Solok untuk periode dua puluh tahun mendatang.
2. Visi pembangunan pada RPJPD ini diformulasikan dalam bentuk yang ringkas dan singkat, tetapi padat, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh seluruh lapisan masyarakat. Bila masyarakat sudah memahami dan mengingat visi tersebut, mereka diharapkan akan dapat pula mempedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-sehari dan menjadikannya sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan gerak langkah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Bila hal itu dapat diwujudkan, partisipasi masyarakat dalam menggerakkan dan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan

diharapkan akan dapat pula dioptimalkan, sehingga terwujud keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat, dan dunia usaha, dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

3. Memperhatikan kondisi umum daerah Kota Solok, sebagaimana diuraikan pada bab 2 dan prediksi 20 tahun mendatang sebagaimana disajikan pada bab 3 serta hasil penjangkauan aspirasi masyarakat, visi pembangunan jangka panjang Kota Solok untuk periode 20 tahun mendatang dapat diformulasikan secara ringkas sebagai berikut:

***Solok Menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa dan Pendidikan di Sumatera Bagian Tengah Tahun 2025***

4. Kota Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan sengaja dipilih sebagai visi pembangunan jangka panjang mengingat analisis tentang kondisi umum daerah pada bab 2 menunjukkan, bahwa kontribusi sebesar 64,9% dari nilai PDRB Kota Solok, ternyata berasal dari kegiatan perdagangan, transportasi, dan jasa. Demikian juga dengan pendidikan, Kota Solok selama ini juga telah menjadi tujuan untuk melanjutkan pendidikan bagi calon siswa dan calon mahasiswa yang berasal dari wilayah sekitar Kota Solok. Dengan demikian, pembangunan jangka panjang Kota Solok yang diarahkan pada kelompok kegiatan ini diperkirakan akan dapat mengangkat kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat kota secara keseluruhan. Kegiatan lainnya, seperti pertanian dan industri, juga akan tetap dikembangkan sebagai kegiatan pendukung dan penunjang.
5. Untuk memudahkan penyusunan target perencanaan, beberapa indikator kinerja pencapaian visi pembangunan tersebut perlu ditetapkan. Dalam hal ini, terdapat 6 indikator kinerja utama pencapaian visi dan misi RPJPD Kota Solok sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut:
  - (a) Sumbangan sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB Kota Solok mencapai 75%;
  - (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) minimum 82;
  - (c) Pendapatan per kapita sekitar US 4.716 dengan Indeks Gini Ratio paling tinggi 0,25;
  - (d) Tingkat pengangguran 6,5%;
  - (e) Persentase penduduk miskin 7,5%;
  - (f) Tersedianya air minum 20 liter per kapita.

#### **IV.2 MISI PEMBANGUNAN DAERAH**

Misi pembangunan, pada dasarnya, merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain, misi pembangunan menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan daerah yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula. Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Solok sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Mewujudkan perdagangan dan jasa berdaya saing global;
  - (b) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
  - (c) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
  - (d) Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya;
  - (e) Mewujudkan prasarana dan sarana kota berkualitas;
  - (f) Mewujudkan tata ruang dan lingkungan yang sehat.
1. Misi untuk *mewujudkan usaha perdagangan dan jasa berdaya saing global* merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan menciptakan kondisi persaingan yang sehat dan kondusif dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta praktek kegiatan usaha yang tidak adil dan merugikan pihak lain, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana ekonomi yang berkualitas secara merata ke seluruh pelosok daerah, dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.
  2. Misi untuk *mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas* merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan kota perdagangan, jasa dan pendidikan yang maju dan mampu bersaing. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama, yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi di semua strata, pengembangan *Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni* (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta derajat kesehatan yang tinggi dan merata ke seluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi, dan terdapatnya kesetaraan *gender* sehingga tenaga kerja wanita dapat pula dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan keahliannya.
  3. Misi untuk *mewujudkan tata pemerintahan yang baik* merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong

proses pembangunan Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan. Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan berjalan secara demokratis, taat pada aturan hukum, transparan, dan menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan secara terpadu berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan cara demikian, pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, berwibawa, dan didukung oleh segenap lapisan masyarakat diharapkan akan dapat diwujudkan.

4. Misi untuk *mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya* adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai landasan dan upaya utama untuk dapat mewujudkan Solok sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pendidikan. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama oleh masyarakat Kota Solok. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian, antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli kepada sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, dan peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Allah S.W.T.
5. Misi untuk *mewujudkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas* sangat penting artinya dalam mewujudkan Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan. Tidak dapat disangkal, bahwa kegiatan perdagangan, jasa dan pendidikan sangat tergantung pada ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan, seperti jalan, terminal, listrik, air minum, fasilitas telekomunikasi, fasilitas pasar, pertokoan serta fasilitas pendidikan. Dengan tersedianya prasarana dan sarana tersebut secara cukup dan berkualitas, kegiatan perdagangan, jasa dan pendidikan akan dapat dikembangkan dengan lebih cepat dan mempunyai daya saing yang kuat.
6. Misi untuk *mewujudkan tata ruang dan lingkungan yang sehat* juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pencegahan pengotoran air, pengupayaan lingkungan yang bersih dan segar, dan penerapan rencana tata ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, dan meningkatkan konservasi alam.

## BAB V

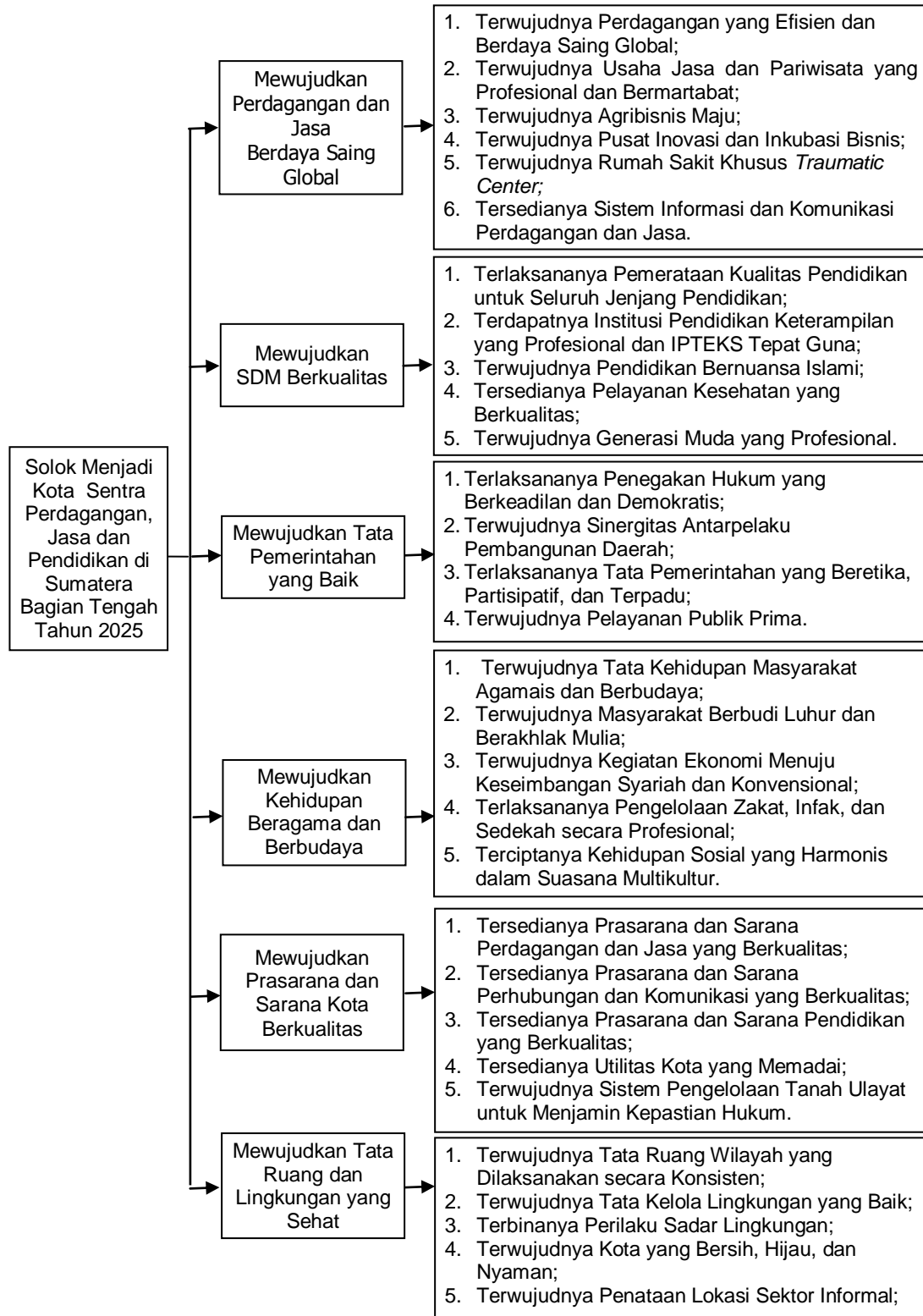
### ARAH DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

**M**engingat RPJPD merupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan terkait lainnya, perumusan arah pembangunan jangka panjang dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJPD Kota Solok ini. Arah pembangunan jangka panjang menunjukkan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh setiap upaya pembangunan daerah yang akan dilakukan. Sementara, pentahapan pembangunan merupakan skala prioritas atau tekanan pembangunan daerah yang harus dilakukan untuk tiap-tiap periode lima tahunan dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan semula. Dengan adanya arah dan pentahapan pembangunan kota ini, RPJPD Kota Solok ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan konkrit tentang peta perjalanan (*road map*) arah dan sasaran pembangunan kota yang ingin dicapai selama periode 20 tahun ke depan.

#### V.1 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, visi pembangunan daerah Kota Solok tahun 2005-2025 adalah Solok Menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa dan Pendidikan di Sumatera Bagian Tengah Tahun 2025. Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut, ditetapkan pula 6 misi utama pembangunan daerah. Pada bab ini, keenam misi pembangunan kota tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk arah pembangunan yang lebih konkrit untuk tiap-tiap aspek dan bidang pembangunan daerah. Arah pembangunan tersebut, pada dasarnya adalah rincian kondisi dan sasaran misi yang akan dicapai di masa mendatang, untuk dapat mewujudkan visi pembangunan Kota Solok yang telah ditetapkan terdahulu. Gambar 5.1 menggambarkan sistematika alur pikir tentang kaitan antara visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Solok 2005-2025.

**Gambar 5.1 Sistematika Keterkaitan antara Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2005-2025**



## **A. Mewujudkan Perdagangan dan Jasa Berdaya Saing Global**

Misi pembangunan ini dilaksanakan dengan mewujudkan arah dan sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

### **1. Terwujudnya Perdagangan yang Efisien dan Berdaya Saing Global**

Dengan mempertimbangkan peluang yang ada dan potensi yang dimiliki oleh Kota Solok, kota ini diharapkan akan dapat berkembang pesat pada bidang perdagangan, khususnya untuk produk pertanian, industri kecil, dan kerajinan rumah tangga. Usaha perdagangan produk pertanian diperkirakan akan mempunyai potensi cukup besar di Kota Solok. Hal itu disebabkan karena kota ini dikelilingi oleh daerah pertanian dan perkebunan, seperti Kabupaten Solok, Tanah Datar, Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya. Di samping itu, usaha perdagangan ini diharapkan akan semakin banyak menggunakan tenaga kerja wanita yang masuk ke dalam pasar kerja. Mengingat persaingan semakin tajam, kegiatan perdagangan yang dikembangkan diusahakan agar lebih efisien, sehingga mampu bersaing di dunia global. Dengan mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi informasi dan fasilitas IPTEK lainnya, usaha perdagangan ini diharapkan akan dapat menguasai perdagangan di wilayah Sumatera Bagian Tengah.

### **2. Terwujudnya Usaha Jasa dan Pariwisata yang Profesional dan Bermartabat**

Sejalan dengan perkembangan usaha perdagangan, kegiatan usaha jasa dan pariwisata yang dikelola secara profesional dan bermartabat perlu pula dikembangkan. Usaha jasa tersebut, meliputi kegiatan pengangkutan dan transportasi, jasa perorangan, dan jasa umum lainnya. Sementara, kegiatan pariwisata, meliputi perhotelan, rumah makan, pengelolaan objek wisata, dan penjualan cendera mata (*souvenir*). Pengembangan kegiatan pariwisata ini dilakukan secara bermartabat, dengan menjunjung tinggi unsur agama dan budaya serta menghindari unsur prostitusi dan perjudian. Untuk keperluan itu, prasarana dan sarana yang diperlukan dan tenaga ahli yang terampil di berbagai bidang kegiatan terkait perlu dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung usaha kegiatan jasa dan pariwisata tersebut perlu pula terus dikembangkan.

### **3. *Terwujudnya Agribisnis Maju***

Kota Solok dikelilingi oleh daerah penghasil produk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan, seperti Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Tanah Datar. Pada umumnya, hasil produksi tersebut diolah dan dipasarkan melalui Kota Solok. Memperhatikan potensi ini, dalam jangka panjang, Kota Solok akan dapat dikembangkan sebagai pusat agribisnis yang meliputi kegiatan pengolahan hasil produk pertanian dan pemasarannya, baik dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, maupun Provinsi Jambi. Untuk itu, berbagai industri pengolahan hasil pertanian dan fasilitas pasar khusus untuk produk-produk pertanian, peternakan, dan perkebunan perlu dikembangkan.

### **4. *Terwujudnya Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis***

Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa perlu didukung dengan pendirian sebuah *Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis* di Kota Solok. Pendirian pusat ini dimaksudkan untuk dapat mengembangkan kegiatan inovasi atau penciptaan usaha baru dalam bidang bisnis. Di samping itu, pusat ini juga berfungsi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan inkubasi dalam bentuk magang dan pelatihan praktis untuk para pengusaha dalam mengembangkan kegiatan bisnisnya. *Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis* ini akan dapat pula menunjang pengembangan Solok sebagai kota Perdagangan, Jasa dan Pendidikan yang maju dan berdaya saing global, melalui penciptaan kegiatan bisnis baru dan mengembangkan kemampuan teknis kewirausahaan pengusaha daerah.

### **5. *Terwujudnya Rumah Sakit Khusus Traumatic Center***

Di bidang kesehatan, arah pembangunan utama kesehatan adalah memastikan berfungsinya pelayanan kesehatan dasar secara baik dan merata. Selanjutnya, pembangunan kesehatan juga diarahkan pada pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat kurang mampu dan miskin. Di samping itu, pengembangan rumah sakit juga diarahkan menjadi lebih spesifik, khususnya untuk menjadi rumah sakit pusat trauma karena kecelakaan (*traumatic center*), yang melayani wilayah Sumatera Bagian Tengah. Arah ini sengaja dipilih karena diprediksi kecelakaan lalu lintas akan terus meningkat di masa mendatang. Karena Kota Solok terletak di persimpangan jalan dari Jambi, Palembang, Lampung, dan Jakarta menuju Padang, Bukittinggi, Pekanbaru atau Medan, atau sebaliknya, kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas akan sangat penting artinya. Dalam hal itu, segala upaya pengembangan tenaga pelayanan medis, dokter, dan sanitarian akan diarahkan pada



kekhasan tersebut. Di samping itu, manajemen pelayanan kesehatan juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan statusnya, sehingga dalam jangka panjang akan dapat terakreditasi dengan ISO.

**6. *Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Perdagangan dan Jasa***

Di samping fasilitas jalan, listrik, air minum, dan perhubungan, sistem informasi dan komunikasi juga merupakan urat nadi bagi pengembangan kegiatan ekonomi sebuah kota. Sistem informasi dan komunikasi yang dimaksud, meliputi jaringan telepon, faksimili dan internet. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas komunikasi merupakan upaya yang sangat penting diwujudkan secara bertahap, dalam rangka mendorong pengembangan Kota Solok menuju kota Perdagangan, Jasa dan Pendidikan di masa mendatang.

**B. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

Misi pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan mewujudkan arah dan sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

**1. *Terlaksananya Pemerataan Kualitas Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan***

Persoalan utama pendidikan Kota Solok adalah bagaimana pemerataan kesempatan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi warga kota. Untuk itu, pembangunan pendidikan diarahkan, terutama, pada perbaikan kualitas institusi pendidikan yang ada. Beberapa komponen institusi pendidikan yang perlu diperbaiki adalah sarana pembelajaran, seperti buku, perpustakaan, alat pembelajaran, dan bengkel kerja, disertai dengan perbaikan manajemen sekolah. Upaya pemerataan kualitas pendidikan juga dilakukan dengan memperbaiki penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.

**2. *Terdapatnya Institusi Pendidikan Keterampilan yang Profesional dan IPTEKS Tepat Guna***

Agar Kota Solok memiliki kekhasan dalam menyelenggarakan pendidikan menengah, kualitas pendidikan, seperti pendidikan kejuruan, juga diarahkan kepada penguatan penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga yang siap masuk ke pasar kerja, dengan spesifikasi dan keunggulan di bidang manajemen dan industri pengolahan untuk usaha kecil dan

menengah. Dengan demikian, sistem pendidikan perlu diikuti pula dengan kompetensi guru dan tersedianya bengkel kerja. Dalam jangka panjang, institusi pendidikan kejuruan di Kota Solok diharapkan menjadi salah satu penyelenggara pendidikan kejuruan terbaik di Sumatera Barat. Untuk memfasilitasi generasi muda dalam meningkatkan pendidikan keterampilan ke jenjang pendidikan tinggi, pendirian sebuah Politeknik yang memfokuskan diri pada pendidikan teknologi dan tata niaga perlu pula diupayakan. Masyarakat maju yang diinginkan, ditandai dengan adanya kemampuan IPTEKS yang maju dan terpakai. Oleh karena itu, IPTEKS perlu dipelajari dan dikembangkan oleh institusi pendidikan menengah dan tinggi yang ada di Kota Solok. Upaya ini, sebaiknya, difokuskan untuk peningkatan nilai tambah produksi barang dan jasa melalui perbaikan teknologi produksi dan penciptaan produk-produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat kota. Dalam rangka itu, pendirian *Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis* yang merupakan wadah tenaga ahli dan profesional untuk pengembangan dan penerapan IPTEK dalam mendorong kegiatan ekonomi kota perlu diupayakan. Dengan demikian, keberadaan Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis tersebut diharapkan akan dapat pula mendorong peningkatan investasi, baik dalam kota, nasional, maupun luar negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Solok dapat ditingkatkan, yang selanjutnya akan dapat pula memperbaiki kesejahteraan warga kota.

### **3. *Terwujudnya Pendidikan Bernuansa Islami***

Di samping pendidikan yang telah diselenggarakan dalam bentuk sekolah umum dan kejuruan, dalam jangka panjang, Kota Solok juga perlu mewujudkan terselenggaranya pendidikan dengan sistem berasrama (*boarding school*), yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang baik. Pendidikan berasrama ini, pada dasarnya, menekankan pada pengintegrasian antara pendidikan umum dan pendidikan agama Islam, sehingga dalam jangka panjang akan dapat dihasilkan penyelenggaraan pendidikan yang mampu memberikan mutu yang lebih tinggi dan menerapkan nilai-nilai moral dan akhlak yang lebih baik. Dalam hal itu, satu dari sekolah berasrama di Kota Solok perlu diupayakan menjadi yang terbaik di seluruh wilayah Sumatera.

### **4. *Tersedianya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas***

Di bidang kesehatan, arah pembangunan utama kesehatan adalah memastikan berfungsinya pelayanan kesehatan dasar secara baik dan merata. Selanjutnya, pembangunan kesehatan juga diarahkan pada pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat kurang mampu dan miskin. Di samping itu, manajemen pelayanan

kesehatan juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan statusnya, sehingga dalam jangka panjang akan dapat terakreditasi dengan ISO.

## 5. Terwujudnya Generasi Muda yang Profesional

Pembangunan pemuda diarahkan pada pemenuhan aspek pendidikan formal dan juga dibarengi dengan pengembangan keterampilan berorganisasi dan keterlibatan mereka dalam segala bentuk kegiatan keolahragaan dan seni. Upaya ini, sekaligus, diharapkan dapat memperkecil dampak negatif dari arus globalisasi. Selain itu, pembangunan kepemudaan juga disertai dengan meningkatkan pembekalan diri yang ditujukan pada persiapan pemuda yang nantinya dapat mendorong visi kota, yakni menjadi kota Perdagangan, Jasa dan Pendidikan. Dengan demikian, profesional diterjemahkan kepada pemenuhan keterampilan perdagangan dan jasa serta keterampilan yang mendukung hal itu.

## C. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

Misi pembangunan daerah ini dapat dilaksanakan dengan mencapai arah dan sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

### 1. *Terlaksananya Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Demokratis*

Penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan penerapan hukum adat lokal perlu terus dilakukan secara sungguh-sungguh guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Prinsip demokratisasi dan penegakan hukum yang efektif, bermakna bahwa demokrasi tidak berarti kebebasan yang semena-mena, karena prasyarat utama demokrasi itu sendiri ialah adanya pembatasan yang jelas dan menjamin akses bagi semua komponen masyarakat dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Dalam hal itu, upaya utama adalah bagaimana penegakan hukum dapat berjalan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu, seperti pemberantasan *korupsi, kolusi, dan nepotisme* (KKN), perlindungan HAM dan hukum adat lokal. Di samping itu, figur pejabat teladan yang dikenal taat aturan hukum dan memberikan peluang bagi lahirnya aparat penegak hukum yang mempunyai reputasi cemerlang, bersih, berwibawa, dan berani perlu pula mulai diciptakan. Selanjutnya, pembangunan bidang hukum juga diarahkan pada upaya mendorong tegaknya aturan secara konsisten dan berkeadilan. Untuk itu, penguatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum perlu terus dilakukan, sejalan dengan upaya untuk menghidupkan gerakan sadar dan taat hukum dalam masyarakat.

## **2. *Terwujudnya Sinergitas Antarpelaku Pembangunan Daerah***

Upaya pertama yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah terbangunnya sinergitas antarpelaku pembangunan, yang meliputi: komponen pemerintah daerah (SKPD), pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan terbangunnya sinergitas tersebut, masalah pembangunan tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah semata, tetapi juga beban dan tanggung jawab masyarakat. Dalam hal itu, pemerintah kota akan lebih berperan sebagai “fasilitator” dalam mendorong terbangunnya sinergi antar komponen tersebut di atas. Dengan terbangunnya sinergitas antara berbagai komponen pemerintah daerah, aspek “pembangunan terpadu” tidak lagi hanya sekedar retorika, tetapi terjamin pelaksanaannya, sehingga koordinasi program dan kegiatan semakin koheren dan solid. Di samping itu, kondisi tersebut akan dapat membuka partisipasi yang lebih luas dari pelbagai komponen masyarakat, baik pada tingkat perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

## **3. *Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Beretika, Partisipatif, dan Terpadu***

Perbaikan manajemen pemerintahan daerah yang baik akan mengarah pada upaya-upaya perbaikan tata pemerintahan di daerah, yang selanjutnya mendorong terwujudnya pengembangan kapasitas (*capacity building*), efisiensi, dan efektivitas aparatur dan kelembagaan daerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran perlu diwujudkan secara terus-menerus, sehingga apa yang direncanakan sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam anggaran. Hal itu sangat penting untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan disepakati semula. Di samping itu, proses penyusunan rencana anggaran dan perumusan kebijakan pembangunan daerah perlu pula dilakukan secara partisipatif agar aspirasi masyarakat dapat diserap secara lebih baik, sehingga kegiatan pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Sejalan dengan hal tersebut, pengendalian (*monitoring*), evaluasi, dan pengawasan perlu pula ditingkatkan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih baik, sesuai dengan yang diharapkan.

## **4. *Terwujudnya Pelayanan Publik Prima***

Pelayanan yang prima merupakan salah satu fungsi utama dari birokrasi pemerintahan yang baik. Birokrasi pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien hanya bisa terwujud apabila terjadi

pelayanan yang cepat, murah, ada kepastian, dan tidak berbelit-belit. Arah pembangunan, dalam hal ini, adalah terus mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan berdedikasi baik. Masalah utama dalam birokrasi kita dewasa ini adalah budaya kinerja birokrasi yang belum berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Sejalan dengan peningkatan kualitas aparatur daerah, pengadaan dan pemeliharaan pangkalan data (*data-base*) dan penggunaan instrumen ICT dalam pemerintah (a.l. via *e-government*) perlu pula dilakukan. Di samping itu, penyediaan lembaga pelayanan dan standar pelayanan minimal dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang sudah harus dilakukan untuk membangun sistem pelayanan prima yang lebih handal. Pelayanan publik prima akan berdampak baik, bukan hanya terhadap pencitraan birokrasi yang baik, melainkan juga menyelesaikan urusan dalam waktu dan tenaga lebih cepat. Dengan demikian, dalam jangka panjang, profesionalisme aparatur daerah menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

#### **D. Mewujudkan Kehidupan Beragama dan Berbudaya**

Misi pembangunan ini dilaksanakan dengan jalan mewujudkan arah dan sasaran pembangunan kota, sebagai berikut:

##### **1. *Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Agamais dan Berbudaya***

Pada dasarnya, agama merupakan pedoman dan tuntunan hidup bagi manusia agar selamat di dunia dan di akhirat nanti. Bila hukum dan pesan tersebut dapat diamalkan secara *kaffah* dalam kehidupan sehari-hari, tata kehidupan masyarakat yang agamais akan tercipta dan dapat menjadi sinergi dalam mewujudkan proses pembangunan kota. Selanjutnya, pembangunan tidak hanya perlu ditujukan pada terwujudnya tata kehidupan beragama yang baik, tetapi juga pada terbentuknya hubungan sosial yang harmonis antar berbagai golongan masyarakat. Di samping itu, tata kehidupan beragama yang baik juga dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan ibadah individual menuju pada ibadah sosial dan spiritual serta berlaku sholeh antar sesama individu dan antar kelompok masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan, bahwa masyarakat Kota Solok secara umum mengakui dan menganggap penting peran agama dan kebudayaan sebagai penunjang tata kehidupan secara menyeluruh. Agama dan budaya merupakan satu kesatuan dalam tata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, arah yang ingin diwujudkan dalam keterkaitan dua bidang itu adalah tata kehidupan yang agamais dan berbudaya.

## **2. *Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia***

Tendensi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan, bahwa masyarakat menyadari kembali akan pentingnya peranan moral dan akhlak untuk mendorong pembangunan manusia khususnya dan pembangunan daerah umumnya. Hanya dengan moral dan akhlak yang baik, proses pembangunan dapat berjalan secara terarah, berkeadilan, dan menghormati hak azasi manusia. Di samping itu, terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak mulia juga diperkirakan akan dapat menjadikan Kota Solok sebagai salah satu 'ranah' yang dapat mempersiapkan generasi yang maju dan mampu bersaing pada tataran nasional dan internasional. Untuk masa mendatang, pelaksanaan ajaran budaya di tengah masyarakat harus berlandaskan pada perilaku yang bermoral, menjauhi konflik terbuka yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial, saling menghargai sesama umat beragama, dan tingkat toleransi yang semakin tinggi. Pembentukan perilaku keagamaan dan kebudayaan, terutama diarahkan untuk menciptakan suasana kehidupan yang aman dan sejahtera, baik lahir maupun batin, dengan meminimalkan faktor-faktor penyebab konflik sosial dalam masyarakat.

## **3. *Terwujudnya Kegiatan Ekonomi Menuju Keseimbangan Syariah dan Konvensional***

Praktek kegiatan ekonomi diharapkan akan semakin mengacu pada sistem syariah, di luar yang selama ini digunakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Praktek ekonomi syariah ditandai dengan semakin besarnya proporsi masyarakat yang memperoleh pembiayaan melalui praktek syariah dan *mudharabah*, dalam rangka mewujudkan kegiatan ekonomi yang berkeadilan dan lebih memperhatikan golongan penduduk miskin. Dengan demikian, dalam jangka panjang, sekitar 40% praktek ekonomi sistem ini diharapkan akan terlaksana. Untuk itu, institusi keuangan syariah diharapkan dapat semakin berkembang pesat pada masa yang akan datang, sehingga praktek kegiatan ekonomi kota akan dapat terwujud secara seimbang antara syariah dan konvensional.

## **4. *Terlaksananya Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah secara Profesional***

Selain dari pelaksanaan ibadah sosial lainnya, salah satu ukuran keberhasilan tata kehidupan yang berlandaskan agama adalah semakin banyaknya wajib zakat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan agama. Dengan demikian, potensi pengumpulan dan pengelolaan zakat ini diharapkan akan menjadi satu arah yang

sangat jelas dalam merumuskan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran khususnya dan pembangunan kota pada umumnya. Dengan cara demikian, kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan akan berkurang, sehingga kehidupan masyarakat yang lebih merata dan sejahtera dapat diwujudkan.

#### **5. Terciptanya Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Suasana Multikultur**

Memperhatikan perkembangan pembangunan Kota Solok beberapa tahun terakhir, dalam jangka panjang, masyarakat Kota Solok diperkirakan berpotensi menjadi masyarakat yang multikultur, karena kehidupan kota yang sangat terbuka terhadap kedatangan berbagai kelompok masyarakat dan sosial lainnya. Seiring dengan meningkatnya pembangunan Kota Solok, kehadiran masyarakat dari wilayah lain, baik dari dalam Provinsi Sumatera Barat maupun dari daerah lain di Indonesia, akan terus mewarnai mosaik sosial kota. Masyarakat Kota Solok 20 tahun mendatang diperkirakan akan semakin heterogen dan majemuk, karena perbedaan asal-usul, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan gaya hidup. Dalam kondisi sosial yang beranekaragam tersebut, sikap toleran antar masyarakat yang multikultur sangat diperlukan. Perbedaan latar belakang agama, kebudayaan, dan asal-usul perlu disatukan dengan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Budaya kebersamaan dalam perbedaan merupakan strategi dasar yang diperlukan untuk mewujudkan keharmonisan, toleransi, dan etika sosial keagamaan di antara anggota masyarakat, yang tidak hanya beridentitas Minangkabau dan Islam, tetapi juga beridentitas suku bangsa lainnya, yang sama-sama berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan daerah.

#### **E. Mewujudkan Prasarana dan Sarana Kota Berkualitas**

Misi pembangunan daerah ini diharapkan akan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan arah pembangunan kota, sebagai berikut:

##### **1. Tersedianya Prasarana dan Sarana Perdagangan dan Jasa yang Berkualitas**

Dalam rangka mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan berkualitas, upaya pertama yang perlu dilakukan adalah mengupayakan tersedianya prasarana dan sarana perdagangan dan jasa yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prasarana dan sarana perdagangan dan jasa tersebut, meliputi: fasilitas pasar, pertokoan, hotel, restoran, perbankan, dan lain-lainnya. Prasarana

dan sarana ini sangat penting artinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota dan sekaligus mewujudkan visi Solok sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pendidikan untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah.

**2. Tersedianya Prasarana dan Sarana Perhubungan dan Komunikasi yang Berkualitas**

Jaringan jalan raya merupakan prasarana utama dalam sebuah kota untuk mendukung kegiatan perhubungan, perdagangan, dan jasa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jaringan jalan yang tersebar ke seluruh pelosok kota sangat penting artinya untuk pengembangan Kota Solok ke depan. Termasuk dalam pengembangan sistem jalan raya ini adalah pembangunan drainase, trotoar, dan terminal. Fokus perhatian, diarahkan pada pengembangan fasilitas jalan raya yang menuju pusat perdagangan, industri kecil, pasar, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman serta kawasan pendidikan. Tersedianya sistem prasarana jalan ini akan sangat mendukung lalu lintas kota, yang sangat penting artinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Solok di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, jaringan pos dan telekomunikasi akan dikembangkan pula, sesuai dengan perkembangan teknologi.

**3. Tersedianya Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Berkualitas**

Ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan guna mewujudkan tercapainya visi Kota Solok. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan sangat penting artinya untuk pengembangan Kota Solok ke depan. Fokus perhatian, diarahkan pada pengembangan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan tinggi, sehingga dengan daya dukung ini, diharapkan calon siswa dan mahasiswa yang berasal dari daerah Sumatera Bagian Tengah tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Kota Solok.

**4. Tersedianya Utilitas Kota yang Memadai**

Tersedianya utilitas kota, seperti listrik dan air minum yang cukup, merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan sosial dalam sebuah kota. Fasilitas listrik dan air minum tersebut tidak hanya diperlukan untuk mendukung kegiatan warga kota, tetapi juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kota. Dalam hal itu, peningkatan kapasitas tenaga listrik dan air minum Kota Solok merupakan upaya yang sangat penting untuk menunjang pembangunan Kota Solok ke depan.



## **5. *Terwujudnya Sistem Pengelolaan Tanah Ulayat untuk Menjamin Kepastian Hukum***

Pemanfaatan tanah ulayat menurut hukum adat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik yang berada dalam persekutuan suku, maupun yang berada dalam persekutuan kaum. Di samping itu, keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat adalah sebagai aset yang menjamin keberlangsungan silsilah dalam kekerabatan matrilineal secara turun-temurun. Oleh sebab itu, keberadaan tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan. Jika tidak, ia akan terus berkurang dari waktu ke waktu, yang dapat menjadi pangkal mula kemiskinan. Berdasarkan kaedah-kaedah ekonomi dan sosial dari tanah ulayat tersebut, ke depan, suatu kebijakan yuridis tentang pemanfaatan tanah ulayat tersebut haruslah dibuat, dengan melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) tanah ulayat, yang diformulasikan dari hukum adat menjadi hukum positif. PERDA tersebut mengatur tentang sistem pemanfaatan tanah ulayat untuk tujuan ekonomi, sosial, dan pembangunan. Dengan itu, tanah ulayat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kekuatan permodalannya sendiri (*self-financing*), usaha bersama (*joint venture*) dengan sistem bagi hasil ataupun sebagai penyertaan modal, atau disewapakaikan dalam rentang waktu tertentu.

## **F. *Mewujudkan Tata Ruang dan Lingkungan yang Sehat***

Misi pembangunan jangka panjang ini akan dilaksanakan secara operasional dengan mewujudkan arah dan sasaran pembangunan kota, sebagai berikut:

### **1. *Terwujudnya Tata Ruang Wilayah yang Dilaksanakan Secara Konsisten***

Kondisi kehidupan kota yang nyaman memerlukan ketertiban dalam penataan ruang wilayah, yang berhulu kepada tertatanya ruang wilayah dengan baik. Tata ruang yang tidak ditata dengan baik akan menimbulkan kesemrawutan pada semua aspek kegiatan di atas ruang. Oleh karena itu, tata ruang yang baik perlu diwujudkan dengan mempedomani dokumen rencana yang telah ada. Tata ruang yang baik dan dilaksanakan secara konsisten dapat diwujudkan, apabila dilakukan: (a) Penyusunan dokumen tata ruang dengan baik, karena dokumen perencanaan tata ruang merupakan acuan pemerintah daerah secara resmi dalam menata ruang. (b) Ketaatan dalam pelaksanaan RTRW. Setiap kegiatan yang menempatkan segala sesuatu di atas ruang harus sesuai dengan peruntukannya. Peruntukan yang berbeda dari ketentuan yang ada hanya dapat dilakukan jika telah dilakukan revisi terhadap rencana

tata ruang yang ada. (c) Pengendalian pemanfaatan ruang agar dilaksanakan melalui perizinan dan pengawasan yang benar dan konsekuen, sehingga rencana yang telah ada terlaksana secara baik. Dampak positif yang diharapkan adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang teratur, tertib, produktif, sehat, aman, dan nyaman, dengan lingkungan yang menyenangkan.

## **2. *Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan yang Baik***

Tata kelola lingkungan yang baik dan asri perlu diwujudkan untuk menjaga ekosistem yang ada dan mempertahankan kehidupan sumber daya hayati yang ada di alam. Jika keseimbangan ekosistem terganggu, maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Tata kelola lingkungan yang baik dan asri berbasis pada perlindungan kawasan konservasi alam, menjaga kualitas air dan udara, dan melaksanakan rehabilitasi lahan kritis secara konsekuen. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat menyebabkan naiknya tekanan terhadap lahan, polusi udara, dan penurunan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Agar kondisi ini tidak terjadi, tata kelola lingkungan yang baik dan asri diperlukan, yang meliputi: perencanaan lingkungan yang komprehensif, penataan organisasi pengelola lingkungan, penggerakan organisasi yang ada untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang baik, dan pengendalian kondisi lingkungan hidup. Tata kelola lingkungan yang baik ditandai oleh: (a) perlindungan kawasan konservasi alam agar keseimbangan ekosistem tidak terganggu melalui pengawasan yang lebih ketat; (b) pengendalian kualitas air dan udara untuk mendapatkan kualitas air dan udara yang baik; dan (c) terlaksananya rehabilitasi lahan kritis melalui penghijauan, *terrassering* lahan, penambahan unsur hara, dan pengawasan penggunaan lahan.

## **3. *Terbinanya Perilaku Sadar Lingkungan***

Perilaku masyarakat sangat menentukan kualitas lingkungan hidup. Tingkat kesadaran lingkungan masyarakat yang rendah menyebabkan gangguan terhadap lingkungan menjadi tidak terkendali, yang berujung pada kerusakan lingkungan hidup. Agar kesadaran masyarakat terhadap lingkungan meningkat, beberapa upaya perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Pendidikan sadar lingkungan sedini mungkin. Dalam hal ini, pendidikan sadar lingkungan dimulai dari masa kanak-kanak di lingkungan keluarga (prasekolah);

2. Pendidikan sadar lingkungan bagi anak sekolah, yang dilakukan dengan memasukkan mata ajaran tentang lingkungan hidup, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi;
3. Pendidikan sadar lingkungan bagi orang dewasa/masyarakat umum adalah dengan melakukan pendidikan nonformal, seperti penyuluhan tentang lingkungan hidup, secara sistematis dan berkesinambungan. Pendidikan tentang lingkungan hidup, baik formal maupun nonformal bagi seluruh lapisan masyarakat diharapkan akan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Jika kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup sudah tinggi, gangguan terhadap lingkungan hidup semakin rendah. Dengan demikian, lingkungan hidup yang kondusif bagi kehidupan semua makhluk di permukaan bumi, terutama bagi umat manusia, akan dapat diwujudkan.

#### **4. *Terwujudnya Kota yang Bersih, Hijau, dan Nyaman***

Terwujudnya kebersihan kota secara menyeluruh merupakan salah satu persyaratan penting bagi pengembangan sebuah kota. Kota yang kotor akan menimbulkan kondisi yang kurang menyenangkan, tidak sehat, dan kurang menarik bagi para pendatang, yang umumnya mendambakan kebersihan sebagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, terwujudnya kebersihan Kota Solok secara menyeluruh merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk mewujudkan lingkungan hidup kota yang baik dan menyenangkan bagi seluruh warga kota. Dalam hal itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara baik, dengan menggunakan peralatan yang lebih modern untuk melakukan daur ulang dan organisasi yang lebih profesional. Manajemen persampahan kota perlu dikelola secara baik dengan mengarahkan pada sistem pengolahan daur ulang sampah dan limbah. Sampah dan limbah diarahkan untuk dijadikan kompos, yang berguna sebagai pupuk organik.

#### **5. *Terwujudnya Penataan Lokasi Sektor Informal***

Pengembangan kegiatan informal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM). Karena fokus pengembangan Kota Solok adalah pada UKM, sektor informal terlibat di dalamnya secara otomatis. Dalam rangka menjaga ketertiban dan kebersihan kota, beberapa lokasi dan kawasan tempat berjualan yang memadai perlu diupayakan. Kawasan tersebut dilengkapi dengan fasilitas sederhana, tetapi diperlukan oleh para pengusaha sektor informal untuk mengembangkan usahanya. Dengan cara demikian, pengembangan sektor informal diharapkan akan dapat didorong, tanpa harus mengorbankan ketertiban, keindahan, dan kebersihan Kota Solok.

## 5.2 TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk dapat mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Solok tahun 2005-2025 secara bertahap, jelas, dan konkrit, pentahapan pembangunan dan skala prioritas diperlukan untuk tiap-tiap periode 5 tahunan. Pentahapan dan prioritas ditetapkan atas dasar rumusan persoalan utama dan disertai dengan kemungkinan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan masyarakat untuk mencapainya. Oleh karena itu, skala prioritas pada setiap tahapan pembangunan akan berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi, semuanya itu berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya, dalam rangka mewujudkan arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan di atas. Pentahapan dan skala prioritas pembangunan tersebut, nantinya, akan dirinci lebih lanjut untuk tiap-tiap arah pembangunan, sehingga tahapan pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap RPJMD dapat diketahui. Dengan demikian, *peta jalan (road map)* pembangunan Kota Solok dalam mencapai arah pembangunan jangka panjang daerah akan dapat dilihat dengan jelas. Atas dasar pertimbangan tersebut, pentahapan dan skala prioritas yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Solok adalah, sebagai berikut:

### A. RPJMD Ke-1 (2005-2010)

#### Arah Umum

Tekanan utama pembangunan daerah dalam periode RPJMD ke-1, pada dasarnya, adalah pada penyiapan prasyarat dasar untuk terwujudnya Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan. Prasyarat dasar tersebut adalah terdapatnya kondisi prasarana dan sarana perkotaan yang berkualitas, dan tersebar ke seluruh pelosok kota. Prasarana dan sarana tersebut, meliputi prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas jalan raya, lengkap dengan trotoar dan drainase di sepanjangnya; terminal bus dan halte, energi listrik dan air minum; sarana perhubungan dan telekomunikasi; fasilitas pasar; dan pemukiman penduduk. Sejalan dengan itu, pembangunan dilakukan pula dalam bidang agama dan budaya serta tata pemerintahan yang baik, guna mempersiapkan warga Kota Solok menghadapi kehidupan di masa datang, Solok menjadi kota perdagangan, jasa dan pendidikan yang modern. Arah pembangunan menurut tiap-tiap misi dijabarkan di bawah ini, sebagai berikut:

#### A. Pembangunan Ekonomi

1. Dalam rangka *Mewujudkan Perdagangan yang Efisien dan Berdaya Saing GLobal*, arah dan sasaran yang perlu dicapai dalam RPJMD ke-1 ini adalah terlaksananya dengan baik pengembangan usaha perdagangan yang telah ada sekarang melalui perbaikan

manajemen usaha. Sejalan dengan hal tersebut, penataan dan pengembangan fasilitas pasar dan pertokoan yang telah ada dilakukan pula. Selanjutnya, pembangunan pasar-pasar satelit baru di sekeliling kota diupayakan pula untuk melayani penduduk yang bermukim di pinggiran kota. Di samping itu, prasarana dan sarana pasar yang baik dan modern, dengan memenuhi persyaratan kebersihan yang memadai, perlu pula diwujudkan.

2. Guna mengupayakan *Terwujudnya Usaha Jasa dan Pariwisata yang Profesional dan Bermartabat*, pada tahap RPJMD ke-1 ini, prasarana dan sarana untuk pengembangan kegiatan jasa tersebut perlu diupayakan. Khusus untuk pariwisata, perhatian perlu diletakkan pada pengembangan fasilitas perhotelan dan renovasi objek wisata yang telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, pembenahan manajemen usaha perlu diupayakan agar kegiatan dapat dilakukan secara lebih baik dan berdaya saing tinggi. Termasuk ke dalam usaha jasa ini adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan pariwisata yang potensial dikembangkan di kota ini. Untuk keperluan itu, Pemerintah Kota Solok akan melakukan renovasi terhadap objek-objek wisata yang telah ada. Selain itu, juga memfasilitasi kegiatan penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata sehingga pembangunan kepariwisataan dapat berjalan dengan baik.
3. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Agribisnis Maju*, pada RPJMD ke-1 ini, kawasan dengan luas tanah memadai yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan agribisnis yang meliputi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan perlu diwujudkan. Kawasan ini diperlengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat mendukung kegiatan produksi dan pemasaran, seperti jalan masuk dan keluar kawasan, energi listrik, air minum, dan fasilitas lainnya. Dengan adanya kawasan ini, masalah tanah dan prasarana untuk mendukung kegiatan agribisnis sudah akan dapat dipecahkan.
4. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis* di Kota Solok, pada periode RPJMD ke-1 ini, upaya akan difokuskan pada upaya persiapan pendirian pusat inovasi dengan pemilikan modal secara bersama antara pihak swasta dan Pemerintah Kota. Untuk itu, usaha pengadaan tanah dan pembangunan gedung khusus untuk menampung kegiatan ini perlu dilakukan. Pusat ini, nantinya, akan melakukan pengkajian dan pelatihan praktis (inkubasi) untuk mengembangkan kegiatan usaha yang telah ada dan mencari kemungkinan untuk dapat mengembangkan produk-produk baru (inovasi) dengan bahan baku lokal dan menggunakan teknologi tepat guna.

5. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Rumah Sakit Khusus Traumatic Center*, pada periode RPJMD ke-1 ini, konsolidasi kebutuhan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan akreditasi tenaga yang akan terlibat dalam pengembangan rumah sakit tersebut serta pemetaan keperluan tenaga medis perlu dilakukan. Sejalan dengan hal itu, kegiatan dimulai dengan menyediakan dan membebaskan lahan yang cukup untuk pengembangan kompleks rumah sakit khusus *Traumatic Center*, yang mampu melayani wilayah Sumatera Bagian Tengah.
6. Dalam rangka mengupayakan *Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Perdagangan dan Jasa*, pada periode RPJMD ke-1 ini, upaya dilakukan untuk menyusun rencana induk pengembangan sistem informasi dan telekomunikasi, perencanaan lokasi sentral dan menara penghubung, serta pembebasan lahan.

## **B. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia**

1. Guna dapat mendorong *Terlaksananya Pemerataan Kualitas Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan*, prioritas pembangunan pada tahap RPJMD ke-1 ini ditekankan pada upaya untuk melengkapi prasarana dan sarana yang diperlukan guna menuntaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan prasarana dan sarana dilakukan pula untuk jenjang pendidikan menengah lainnya, dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar dan menengah secara menyeluruh di Kota Solok.
2. Untuk dapat mengupayakan *Terdapatnya Institusi Pendidikan Keterampilan yang Profesional dan IPTEKS Tepat Guna*, pada periode RPJMD ke-1 ini, prioritas pembangunan ditekankan pada peningkatan penyediaan prasarana dan sarana untuk menunjang pendidikan kejuruan yang telah ada sekarang. Perhatian, terutama diberikan pada peningkatan penyediaan alat-alat perbengkelan, laboratorium, dan perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Sejalan dengan hal tersebut, pembenahan administrasi dan manajemen sekolah dilakukan pula guna mendorong terlaksananya proses pendidikan secara baik dan berkualitas. Di samping itu, penyelesaian pemetaan antara ketersediaan produk IPTEKS baru dan kebutuhan masyarakat perlu pula dilakukan. Untuk keperluan itu, kelembagaan yang mampu mempercepat proses diseminasi teknologi untuk masyarakat perlu pula dirintis.
3. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Pendidikan Bernuansa Islami*, pada periode RPJMD ke-1 ini, pendidikan dengan sistem

berasrama (*boarding school*) yang dilengkapi prasarana dan sarana yang baik perlu mulai dilaksanakan. Untuk keperluan tersebut, pada tahap ini, beberapa sekolah yang akan dilengkapi dengan fasilitas asrama perlu ditentukan terlebih dahulu. Setelah itu, penyediaan dan pembebasan lahan yang diperlukan, dilakukan pula untuk pembangunan asrama tersebut.

4. Guna mendorong *Tersedianya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas*, pada tahap pertama ini, penyediaan prasarana dan sarana kesehatan perlu ditingkatkan, baik untuk rumah sakit maupun untuk puskesmas, terutama tenaga medis dan peralatan rumah sakit. Peningkatan pelayanan kesehatan ini, terutama, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan warga miskin dan kurang mampu.
5. Untuk mendorong *Terwujudnya Generasi Muda yang Profesional*, pada RPJMD pertama ini, pembangunan kepemudaan diberikan kepada penyelesaian pemetaan keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan pemuda yang profesional. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan prasarana dan sarana olahraga yang selektif dan disertai dengan pembekalan infrastruktur olahraga terkait lainnya perlu diupayakan pula.

### C. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan

1. Dalam rangka *Terlaksananya Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Demokratis*, arah pembangunan dalam RPJMD ke-1 ini diprioritaskan pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum, untuk mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum yang dinilai lamban oleh masyarakat. Arah pembangunan yang perlu diwujudkan pada tahap ini adalah:
  - a. Melakukan pembaharuan komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan atau tidak diskriminatif. Di samping itu, pembenahan terhadap berbagai Peraturan Daerah dilakukan pula guna menyesuaikannya dengan perubahan hukum nasional, khususnya untuk pemantapan pelaksanaan desentralisasi, demokratisasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, perangkat hukum daerah yang mengatur peran serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan perizinan pemanfaatan sumber daya alam perlu disusun dan disiapkan, sebagai salah satu upaya pencapaian tata pemerintahan yang baik, kredibel, transparan, dan akuntabel.

- b. Mentransformasikan berbagai nilai kebajikan Minangkabau ke dalam Peraturan Daerah, sebagai bagian dari pembangunan materi hukum. Upaya ini sejalan dengan prinsip desentralisasi, yang memungkinkan tiap daerah untuk mengaktualisasikan nilai dan tradisi masyarakatnya ke dalam produk hukum daerah, dengan tetap memperhatikan keberagaman dan hak-hak asasi manusia. Mengingat nilai atau norma hukum adat pada umumnya tidak tertulis, norma-norma hukum tertulis perlu disusun. Transformasi norma-norma tidak tertulis menjadi tertulis akan dapat menjamin kepastian hukum dan dipahami secara lebih luas, sadar hukum, dan menghormati hak-hak asasi manusia.
    - c. Membangun kapasitas kelembagaan sosial dan masyarakat, khususnya kelembagaan adat, dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat. Arah pembangunan hukum yang kedua ini didasarkan pada terjadinya kecenderungan selama ini, bahwa kelompok-kelompok masyarakat lebih sering menggunakan tindak kekerasan dalam penyelesaian konflik. Oleh sebab itu, pembangunan bidang hukum Kota Solok perlu pula diarahkan pada upaya pembentukan kesadaran dan kemampuan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah menurut hukum atau secara musyawarah mufakat.
2. Untuk dapat *Terwujudnya Sinergitas Antarpelaku Pembangunan Daerah* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, prioritas utama pada RPJMD ke-1 diletakkan pada upaya untuk merumuskan kembali kebijakan dan penguatan kapasitas koordinasi internal antara *Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)* di satu pihak dan koordinasi eksternal dengan masyarakat di lain pihak, khususnya dengan dunia usaha dan organisasi-organisasi kunci dalam masyarakat. Sejalan dengan upaya pemantapan koordinasi, peningkatan kualitas aparatur daerah yang bersih dan berwibawa sangat penting pula dilakukan, baik melalui rasionalisasi pegawai maupun melalui formula pengawasan melekat.
3. Guna dapat *Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Beretika, Partisipatif, dan Terpadu*, prioritas arah pembangunan pada periode ini diberikan pada upaya-upaya:
  - a. Mempersiapkan pola rekrutmen dan pengembangan karir pegawai daerah yang berorientasi pada sistem mutu (*merit system*), agar aparatur pemerintah menjadi cakap, bersih, dan berwibawa. Aparatur pemerintah yang semakin profesional memungkinkannya untuk berani bersikap tegas (*zakelijk*),



terbuka, dan membuka akses bagi dialog dan keterlibatan yang konstruktif dan interaktif dengan setiap komponen masyarakat, termasuk kaum perempuan, dalam setiap tingkat pengambilan keputusan pembangunan;

- b. Memantapkan tata administrasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan dengan membangun konsensus dan saluran informasi yang bebas dan bertanggung jawab. Ini hanya dimungkinkan apabila pada tahap ini ada ikhtiar untuk mengembangkan kapasitas personalia birokrasi untuk dapat menguasai dan mampu mengoperasikan teknologi informasi (*e-government*), sebagai langkah awal untuk pembangunan birokrasi pemerintahan daerah yang memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan terhadap publik. Sejalan dengan itu, para pengambil keputusan di pemerintahan daerah, swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat memiliki rasa tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan;
  - c. Memantapkan pelaksanaan reorganisasi birokrasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan ramping. Kemudian, upaya ini diikuti pula oleh penyusunan berbagai prosedur tetap atau memperbaiki prosedur tetap yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan terbaru, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan birokrasi.
3. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima*, langkah pertama yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah setiap SKPD menyusun standar pelayanan minimum dan melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, sosialisasi dan advokasi perlu dilakukan, baik melalui diskusi, lokakarya, maupun pelatihan tentang metode dan teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima.

#### **D. Pembangunan Agama dan Budaya**

1. Dalam rangka *Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamais dan Berbudaya*, arah yang perlu diwujudkan dalam periode pertama ini adalah meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan konsep dan nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal itu ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas pelaksanaan ibadah, baik shalat, puasa, zakat, dan haji. Sejalan dengan hal itu, jumlah dan kualitas sarana peribadatan, seperti mesjid dan mûshala, juga semakin meningkat dan tersebar di seluruh pelosok kota.

2. Dalam rangka mencapai *Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia*, arah pertama yang perlu dilakukan dalam periode ini adalah meningkatkan pendidikan moral dan akhlak untuk generasi muda, baik melalui sekolah, mesjid, pesantren, maupun organisasi sosial agama lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, penyakit masyarakat seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, perkelahian, korupsi, pelecehan seksual, dan tindakan amoral lainnya diupayakan semaksimal mungkin untuk berkurang, sehingga generasi muda dapat mengambil contoh konkrit tentang masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Untuk keperluan itu, pemberian sanksi yang tegas dan berat kepada para pelaku merupakan faktor kunci yang perlu dilaksanakan secara konsekuen.
3. Dalam rangka *Terwujudnya Kegiatan Ekonomi Menuju Keseimbangan Syariah dan Konvensional*, praktek ekonomi juga perlu diarahkan menuju keseimbangan antara sistem syariah dan sistem konvensional. Untuk keperluan itu, dalam waktu dekat, praktek bank syariah dan kegiatan ekonomi Islam lainnya perlu dikembangkan secara baik dan profesional. Sejalan dengan upaya tersebut, pengembangan kelembagaan perbankan konvensional, seperti Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), tetap pula dilakukan.
4. Dalam rangka *Terlaksananya Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah secara Profesional*, sumber dana pembangunan yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah perlu dikembangkan. Dalam hal itu, upaya pengembangan lebih dititikberatkan pada perbaikan manajemen pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana untuk kelompok miskin dan masyarakat yang memerlukan. Untuk itu, kelembagaan yang ada perlu ditata dan dikembangkan lagi, yang tidak saja memenuhi aspek sosial, tetapi juga aspek ekonomis.
5. Agar *Terciptanya Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Suasana Multikultur*, pada tahap awal ini, revitalisasi budaya Minangkabau perlu pula diupayakan pelaksanaannya melalui kegiatan pendidikan untuk generasi muda. Sejalan dengan hal tersebut, praktek-praktek budaya adat yang kurang baik, secara bertahap, perlu pula dihilangkan. Di samping itu, gerakan masyarakat Kota Solok untuk selalu bangga memiliki dan menjunjung tinggi kebudayaan Minangkabau perlu pula dimulai.

## E. Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan

1. Dalam rangka mengupayakan *Tersedianya Prasarana dan Sarana Perdagangan dan Jasa yang Berkualitas*, pada periode RPJMD ke-1 ini, rencana induk pengembangan perdagangan dan jasa diharapkan dapat tersusun berikut peningkatan fasilitas perdagangan serta ketersediaan lahan untuk perluasan fasilitas perdagangan yang ada.
2. Dalam rangka mengupayakan *Tersedianya Prasarana dan Sarana Perhubungan yang Berkualitas*, pada periode RPJMD ke-1 ini, pelebaran dan peningkatan kualitas jalan raya yang menghubungkan pusat kota dengan daerah pemukiman penduduk yang padat diharapkan akan dapat terwujud. Pelebaran dan peningkatan kualitas jalan tersebut dilengkapi dengan pembangunan trotoar, drainase, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan berlaku, agar lalu lintas dapat berjalan dengan baik dan teratur.
3. Dalam rangka mengupayakan *Tersedianya Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Berkualitas*, pada periode RPJMD ke-1 ini, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan pemerataan dan akses pendidikan, baik bagi warga Kota Solok maupun warga sekitar kota, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Prasarana dan sarana yang diharapkan disini adalah berupa penambahan ruang kelas baru, berikut fasilitas pendukungnya seperti meubilair serta buku-buku pegangan bagi siswa pada semua jenjang pendidikan.
4. Dalam rangka mewujudkan *Tersedianya Utilitas Kota yang Memadai* untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Solok, pada periode RPJMD ke-1 ini, perluasan jaringan listrik ke tempat-tempat daerah pemukiman baru diharapkan akan dapat diwujudkan. Sejalan dengan hal tersebut, perluasan jaringan air minum ke lokasi pemukiman penduduk baru diupayakan pula untuk terwujud. Dengan demikian, pada periode ini, fasilitas listrik dan air minum diharapkan akan dapat diwujudkan secara lebih memadai untuk seluruh warga kota.
5. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Sistem Pengelolaan Tanah Ulayat untuk Menjamin Kepastian Hukum*, pada RPJMD ke-1 ini, inventarisasi dan pemetaan tanah ulayat (ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum), perlu dilakukan, kemudian dilakukan penilaian terhadap potensi ekonomi dan potensi sosial dari tanah ulayat tersebut.

**F. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

1. Guna dapat *Terwujudnya Tata Ruang Wilayah yang Dilaksanakan secara Konsisten*, pada periode RPJMD ke-1 ini, upaya pembangunan, terutama diprioritaskan pada pelaksanaan dokumen tata ruang secara konsekuen, sesuai dengan RTRW yang telah disahkan. Sejalan dengan itu, upaya diarahkan pula pada terwujudnya penyusunan dokumen rencana penunjang pembangunan daerah berupa Rencana Induk Sektoral.
2. Guna *Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan yang Baik*, pada periode RPJMD ke-1, prioritas ditujukan pada perbaikan sarana dan manajemen pengelolaan lingkungan. Sejalan dengan itu, berbagai peraturan diterapkan dengan konsisten, sebagai landasan hukum yang lebih operasional, yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.
3. Dalam rangka *Terbinanya Perilaku Sadar Lingkungan*, prioritas pembangunan pada periode RPJMD ke-1 diletakkan pada pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran tentang perlunya menjaga lingkungan demi keberlanjutan lingkungan hidup yang baik. Pendidikan dan penyuluhan ini dilaksanakan terlebih dahulu terhadap orang dewasa dan dilanjutkan pada anak-anak usia sekolah dan prasekolah. Sejalan dengan kegiatan tersebut, sistem tanggap darurat mulai dikembangkan, yang ditandai dengan tersusunnya rencana penanganan bencana alam, lengkap dengan struktur organisasi dan tata kerjanya. Di samping itu, penyuluhan masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam menghadapi bahaya gempa bumi berkekuatan tinggi dilakukan pula.
4. Dalam *Terwujudnya Kota yang Bersih, Hijau, dan Nyaman*, pada RPJMD ke-1 ini, diprioritaskan pada pembangunan Ruang Terbuka Hijau dilokasi yang strategis. Sejalan dengan itu, manajemen persampahan sudah diterapkan dengan pola yang lebih baik, sehingga kebersihan kota terpelihara dengan baik.
5. *Terwujudnya Penataan Lokasi Kegiatan Sektor Informal* sangat penting artinya untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan untuk golongan ekonomi lemah. Namun demikian, kenyataan masa lalu menunjukkan, bahwa keberadaan sektor informal tersebut dalam sebuah kota juga berimplikasi negatif bagi kebersihan dan keindahan kota. Untuk mengatasi hal itu, pada periode RPJMD ke-1 ini, pemilihan lokasi dan pembebasan lahan untuk kawasan sektor informal ini perlu diupayakan, sehingga kebersihan dan keindahan kota terjaga dan kegiatan sektor informal juga dapat berkembang dengan baik. Pemerintah kota, dalam hal ini, akan memberikan fasilitas prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mewujudkan lokasi khusus sektor informal tersebut.

## B. RPJMD Ke-2 (2011-2015)

### Arah Umum

Memperhatikan hasil yang dapat diperoleh selama RPJMD ke-1, pada periode RPJMD ke-2 ini, tekanan pembangunan diberikan lebih banyak pada *peningkatan kualitas sumber daya manusia* guna mendukung terwujudnya Solok sebagai kota Perdagangan, Jasa dan Pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diprioritaskan pada 3 hal pokok, yaitu peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Sasaran yang ingin dicapai pada periode RPJMD ke-2 ini adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan kegiatan perdagangan, jasa dan pendidikan. Namun demikian, sejalan dengan upaya itu, kegiatan untuk mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang baik dan berkualitas dapat terus dilanjutkan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang masih terbengkalai.

### A. Pembangunan Ekonomi

1. Dalam rangka mewujudkan *Perdagangan yang Efisien dan Berdaya Saing Global*, arah dan sasaran yang perlu dicapai dalam RPJMD ke-2 ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan perdagangan. Sasaran ini akan dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan praktis di bidang manajemen, akuntansi, dan kewirausahaan. Sejalan dengan hal tersebut, persaingan usaha yang sehat dan tidak monopoli diupayakan untuk diwujudkan melalui pelaksanaan Undang-undang Antimonopoli yang telah diterapkan secara nasional. Dengan demikian, kondisi yang kondusif untuk pengembangan usaha di Kota Solok diharapkan akan dapat diwujudkan.
2. Guna mengupayakan *Terwujudnya Usaha Jasa dan Pariwisata yang Profesional dan Bermartabat* di Kota Solok, pada tahap RPJMD ke-2 ini, peningkatan profesionalitas para pengusaha dan tenaga kerja usaha jasa perlu diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan praktis dan magang pada perusahaan yang telah maju. Untuk keperluan itu, Pemerintah Kota Solok akan memfasilitasi kegiatan tersebut dengan penyusunan aturan dan dukungan tenaga ahli, sehingga pelatihan teknis dan kegiatan magang tersebut dapat berjalan dengan baik.
3. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Usaha Agribisnis Maju* di Kota Solok, pada RPJMD ke-2 ini, fasilitas kawasan sentra usaha

agribisnis yang telah dirintis pada periode RPJMD ke-1, seterusnya, akan dikembangkan dan dilengkapi. Fasilitas yang perlu disediakan adalah yang dapat mendukung kegiatan produksi dan pemasaran, yang meliputi jalan masuk dan keluar kawasan, energi listrik, air minum, pergudangan, dan fasilitas terkait lainnya. Dengan dilengkapinya semua fasilitas tersebut, kawasan sentra agribisnis tersebut diharapkan sudah mulai dapat berfungsi dengan baik pada periode RPJMD ke-2 ini.

4. Guna dapat mengupayakan *Terwujudnya Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis* di Kota Solok, pada periode RPJMD ke-2 ini, upaya akan difokuskan untuk membangun dan melengkapi prasarana dan sarana yang diperlukan oleh Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis yang telah dipersiapkan pada RPJMD periode ke-1. Sejalan dengan kegiatan itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia para peneliti dan tenaga administrasi yang terlibat dalam pengelolaan Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis tersebut perlu diwujudkan. Dengan demikian, pada RPJMD ke-2 ini, aktivitas pusat ini diharapkan sudah dapat ditingkatkan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Guna dapat mengupayakan *Terwujudnya Rumah Sakit Khusus Traumatic Center*, pada periode RPJMD ke-2, sebagian penyakit utama dituntaskan dan satu Rumah Sakit Umum yang menjadi rujukan di Sumatera Bagian Tengah, yang mengkhususkan diri pada pelayanan *traumatic center*, dibangun pada periode ini.
6. Dalam rangka mengupayakan *Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Perdagangan dan Jasa*, pada periode RPJMD ke-2 ini, perluasan jaringan dan pembangunan menara penghubung serta penambahan lembaga pelayanan telekomunikasi akan dilakukan. Jaringan telepon yang dapat menjangkau seluruh lokasi perdagangan dan jasa diharapkan pula akan dapat terus dikembangkan. Sejalan dengan itu, penambahan jumlah nomor telepon terpasang perlu dilakukan pula, sehingga dapat melayani perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pada periode RPJMD ke-2 ini, semua wilayah kota diharapkan sudah memiliki fasilitas telekomunikasi yang memadai untuk mendukung kegiatan warga Kota Solok secara keseluruhan.

## **B. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia**

1. Pada tahap kedua ini, guna dapat mendorong *Terlaksananya Pemerataan Kualitas Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan*, prioritas pembangunan ditekankan pada upaya agar seluruh guru sudah memperoleh sertifikasi, disertai dengan prasarana dan sarana

laboratorium dan perpustakaan di seluruh jenjang pendidikan. Agar kualitas pendidikan dapat dirasakan manfaatnya, segala aspek yang menyangkut kurikulum juga sudah tersedia dan diterapkan oleh seluruh jenjang pendidikan.

2. Untuk dapat mengupayakan *Terdapatnya Institusi Pendidikan Keterampilan yang Profesional dan IPTEKS Tepat Guna*, pada periode RPJMD ke-2 ini, prioritas pembangunan ditekankan pada upaya melanjutkan penyelesaian infrastruktur dan ketenagaan yang dibutuhkan pada institusi pendidikan keterampilan profesional, yang sudah dirintis pada tahapan pembangunan sebelumnya. Untuk itu, pada periode ini diharapkan agar Kota Solok sudah memiliki sebuah institusi pendidikan tinggi yang memiliki pendidikan kepoliteknikan. Tenaga dan peralatan yang difokuskan untuk mendukung kota Perdagangan, Jasa dan Pendidikan menjadi pilihan untuk disiapkan. Pembangunan IPTEK juga tidak terlepas dari pembangunan ketenagaan. Setelah peralatan yang dibutuhkan tersedia, ketenagaan yang aktif dalam menjadikan kota ini sebagai pusat inovasi dan inkubasi bisnis menjadi sangat diperlukan.
3. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Pendidikan Bernuansa Islami*, pada periode RPJMD ke-2 ini, selain penyelesaian pembangunan sekolah berasrama, diiringi pula dengan selesainya kurikulum dan penerapannya. Agar kurikulum secara Islami selesai, seluruh tenaga kependidikan yang sudah disiapkan pada tahap pertama, memperoleh pendidikan lanjutan tentang penerapan kurikulum dimaksud.
4. Guna mewujudkan *Tersedianya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas*, pada tahapan kedua ini, pembangunan prasarana fisik yang lebih lengkap mulai dilaksanakan, disertai dengan penyediaan tenaga kesehatan yang profesional. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan persiapan pembenahan sistem dan prosedur pelayanan. Segala upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah untuk menjadikan kota ini menjadi salah satu kota tujuan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Untuk mendorong *Terwujudnya Generasi Muda yang Profesional*, pada RPJMD kedua ini, pembangunan kepemudaan direncanakan untuk melaksanakan pendidikan keterampilan kerja, disertai dengan mengaktifkan kelompok organisasi pemuda. Di bidang olahraga, pembangunan sarana dilanjutkan sampai sarana olahraga yang ada dapat dimanfaatkan.

### C. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan

1. Dalam rangka *Terlaksananya Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Demokratis*, arah pembangunan dalam RPJMD ke-2 ini ditekankan pada upaya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, untuk mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum. Arah pembangunan yang perlu diwujudkan pada tahap ini, antara lain adalah: (a) terus meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan, (b) terus berupaya untuk mentransformasikan berbagai nilai kebajikan Minangkabau ke dalam Peraturan Daerah, khususnya tentang tanah ulayat, sebagai bagian dari pembangunan materi hukum, dan (c) terus membangun kapasitas kelembagaan sosial dan adat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat.
2. Untuk dapat *Terwujudnya Sinergitas Antarpelaku Pembangunan Daerah* di Kota Solok, prioritas utama pada RPJMD ke-2 ini diletakkan pada upaya lanjutan untuk penguatan kapasitas dan koordinasi internal antara *Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)* di satu pihak dan koordinasi eksternal dengan masyarakat dan pihak swasta di lain pihak. Sejalan dengan upaya pematapan koordinasi tersebut, peningkatan kualitas aparatur daerah yang bersih dan berwibawa sangat penting diwujudkan, baik lewat rasionalisasi pegawai maupun lewat formula pengawasan melekat.
3. *Guna Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Beretika, Partisipatif, dan Terpadu*, arah pembangunan pada periode RPJMD ke-2 ini diberikan pada upaya pelaksanaan pengembangan karir pegawai daerah yang berorientasi pada sistem mutu (*merit system*) guna mewujudkan aparatur pemerintah yang cakap, bersih, dan berwibawa. Sejalan dengan hal tersebut, tata administrasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus pula diwujudkan dengan membangun konsensus dan saluran informasi dengan menggunakan sistem *e-government*. Di samping itu, pelaksanaan reorganisasi birokrasi Pemerintah Daerah terus pula dilakukan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi, untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan ramping.
4. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Pelayanan Publik Prima*, upaya yang perlu dilakukan pada periode RPJMD ke-2 ini adalah mulai menerapkan standar pelayanan minimum dan melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan. Berkaitan dengan itu, sosialisasi dan advokasi terus dilakukan, baik melalui diskusi, lokakarya, maupun pelatihan tentang metode dan teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima.



#### D. Pembangunan Agama dan Budaya

1. Dalam rangka mewujudkan *Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamais dan Berbudaya*, arah yang perlu diwujudkan dalam periode RPJMD ke-2 ini adalah melanjutkan upaya yang telah dilakukan selama RPJMD ke-1, guna meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan konsep dan nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas pelaksanaan ibadah, baik shalat, puasa, zakat, dan haji. Sejalan dengan hal itu, jumlah dan kualitas sarana peribadatan, seperti mesjid, mushala, dan tempat pendidikan agama untuk generasi muda, juga akan semakin meningkat dan tersebar di seluruh pelosok kota.
2. Dalam rangka mewujudkan *Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia*, upaya yang perlu dilakukan pada periode RPJMD ke-2 ini adalah terus melanjutkan upaya pada RPJMD ke-1, yakni mewujudkan peningkatan budi dan akhlak masyarakat melalui peningkatan pendidikan moral untuk generasi muda. Sejalan dengan hal tersebut, pembunuhan, pencurian, penipuan, perkelahian, korupsi, pelecehan seksual, penggunaan narkoba, dan tindakan amoral lainnya dalam masyarakat diupayakan semakin berkurang, sehingga generasi muda dapat mengambil contoh konkrit tentang masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Untuk itu, pemberian sanksi yang tegas dan berat kepada para pelaku merupakan faktor kunci yang perlu dilaksanakan secara konsekuen.
3. Dalam rangka mewujudkan *Kegiatan Ekonomi Menuju Keseimbangan Syariah dan Konvensional*, praktek kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan masyarakat perlu terus diarahkan menuju pada keseimbangan antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional. Untuk keperluan itu, praktek bank syariah dan kegiatan ekonomi Islam lainnya perlu dikembangkan terus secara baik dan profesional. Sejalan dengan upaya tersebut, pengembangan kelembagaan bank konvensional, seperti Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta kegiatan jasa lainnya, tetap pula dilakukan. Begitu pula, lembaga keuangan mikro yang ada, baik dalam bentuk BMT maupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), perlu diupayakan pengembangannya, baik kuantitas maupun kualitasnya.
4. Untuk dapat *Terlaksananya Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah secara Profesional*, pada periode RPJMD ke-2 ini, perhatian terutama diarahkan pada peningkatan kualitas personil organisasi

pengelola zakat. Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan teknis jangka pendek guna meningkatkan keahlian dan keterampilan para tenaga pengelola zakat tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan manajemen organisasi pengelola zakat dilakukan pula, agar menjadi lebih efisien dan berdaya guna tinggi.

5. Untuk mempersiapkan *Terciptanya Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Suasana Multikultur*, pada tahap RPJMD ke-2 ini, revitalisasi budaya Minangkabau terus diupayakan pelaksanaannya melalui kegiatan pendidikan untuk generasi muda. Sejalan dengan hal tersebut, kepastian hukum dalam penggunaan *tanah ulayat* perlu pula diwujudkan dalam bentuk pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur penggunaan tanah ulayat tersebut untuk keperluan kegiatan ekonomi kota. Di samping itu, gerakkan untuk selalu bangga memiliki dan menjunjung tinggi kebudayaan Minangkabau sudah mulai berjalan dengan baik.

#### **E. Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan**

1. Dalam rangka mengupayakan *Tersedianya Prasarana dan Sarana Perdagangan dan Jasa yang Berkualitas*, pada periode RPJMD ke-2, fasilitas pasar, pertokoan, hotel, restoran, dan fasilitas lembaga keuangan diharapkan sudah dapat diwujudkan.
2. Dalam rangka mengupayakan *Tersedianya Prasarana dan Sarana Perhubungan yang Berkualitas*, pada periode RPJMD ke-2 ini, pembangunan jalan menuju daerah pemukiman yang baru berkembang diharapkan akan dapat terwujud. Pembangunan jalan baru ini diharapkan sudah dilengkapi dengan pembangunan trotoar, drainase, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan berlaku, agar lalu lintas dapat berjalan dengan baik dan teratur. Dengan demikian, pada periode RPJMD ke-2 ini, wilayah kota yang dapat dilengkapi dengan prasarana jalan yang baik diharapkan sudah semakin luas, sehingga mobilitas penduduk dalam kota sudah semakin lancar.
3. Dalam rangka mengupayakan *Tersedianya Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Berkualitas*, pada periode RPJMD ke-2 ini, pembangunan unit sekolah baru, khususnya sekolah kejuruan perlu disiapkan. Sejalan dengan itu, juga perlu dilengkapi dengan sarana pendukungnya seperti perpustakaan, laboratorium dan bengkel kerja. Karena itu, diharapkan dengan lengkapnya fasilitas pendidikan tersebut, menjadi daya tarik tersendiri dalam menjaring calon siswa untuk melanjutkan pendidikan di Kota Solok.

4. Dalam rangka mewujudkan *Tersedianya Utilitas Kota yang Memadai* untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Solok, pada periode RPJMD ke-2 ini, terus mengupayakan peningkatan kapasitas energi listrik yang dapat dialirkan ke dalam kota melalui lanjutan pemasangan jaringan dan gardu distribusi ke daerah pemukiman baru. Sejalan dengan hal tersebut, perluasan jaringan air minum ke lokasi pemukiman penduduk baru terus pula dilanjutkan. Dengan demikian, pada periode ini, seluruh daerah pusat kota dan wilayah pemukiman sudah akan dapat dialiri dengan energi listrik dan air minum.
5. Pada RPJMD tahap ke-2 ini, upaya untuk dapat *Terwujudnya Sistem Pengelolaan Tanah Ulayat untuk Menjamin Kepastian Hukum* dilanjutkan dengan melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah ulayat, seperti; tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, sesuai dengan hasil inventarisasi. Di samping itu, fungsi dan kinerja Lembaga Kerapatan Adat juga diperkuat untuk memberikan perlindungan hukum dan penyelesaian persengketaan adat yang berkaitan dengan tanah ulayat.

#### **F. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

1. Guna dapat *Terwujudnya Tata Ruang Wilayah yang Dilaksanakan secara Konsisten*, pada periode RPJMD ke-2 ini, upaya pembangunan, terutama diprioritaskan untuk melanjutkan pelaksanaan dokumen secara konsisten sesuai dengan RTRW yang telah disahkan. Berkaitan dengan hal itu, pengenaan sanksi yang tegas dan keras perlu dilakukan terhadap para pelanggar tata ruang dan pembangunan wilayah. Sejalan dengan hal itu, evaluasi dilakukan pula secara berkala terhadap RTRW yang telah dijalankan dan menyesuaikannya dengan kondisi yang berkembang di lapangan.
2. Guna *Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan yang Baik*, pada periode RPJMD ke-2 ini, prioritas diberikan pada perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sejalan dengan kegiatan tersebut, peningkatan sarana laboratorium pengujian yang terdapat pada unit pengelola lingkungan hidup tersebut diupayakan pula, agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, manajemen pengelolaan lingkungan hidup akan terus pula dikembangkan, agar pelaksanaan tata kelola lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik.

3. Dalam rangka *Terbinanya Perilaku Sadar Lingkungan*, pada periode RPJMD ke-2 ini, upaya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan terus dilanjutkan, sehingga masyarakat semakin memahami tentang pentingnya menjaga lingkungan demi keberlanjutan lingkungan hidup yang baik untuk masyarakat. Sejalan dengan kegiatan tersebut, sistem tanggap darurat ditingkatkan, ditandai dengan tersedianya rencana penanganan bencana alam yang komprehensif, lengkap dengan struktur organisasi dan tata kerjanya. Di samping itu, upaya penyuluhan masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam menghadapi bahaya gempa bumi berkekuatan tinggi terus dilakukan kepada berbagai komponen masyarakat.
4. *Terwujudnya Kota yang Bersih, Hijau, dan Nyaman*, upaya pembangunan ruang terbuka hijau terus dilanjutkan di beberapa lokasi. Disamping itu, upaya pengelolaan persampahan dilakukan dengan manajemen yang sudah semakin baik, sehingga Kota Solok menjadi lebih bersih, hijau dan nyaman.
5. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Penataan Lokasi Sektor Informal* di Kota Solok, upaya pada periode RPJMD ke-2 ini diprioritaskan pada peningkatan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan lokasi sentra kegiatan sektor informal, seperti jalan, listrik, dan air minum. Sejalan dengan upaya itu, pembinaan terhadap pengusaha sektor informal tersebut perlu pula dilakukan, agar kualitas pengusaha dan pekerja sektor informal tersebut secara bertahap dapat ditingkatkan.

### C. RPJMD Ke-3 (2016-2020)

#### Arah Umum

Memperhatikan hasil yang diperoleh selama RPJMD ke-2, pada periode RPJMD ke-3 ini, tekanan pembangunan diberikan lebih banyak pada peningkatan penerapan *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (IPTEK), untuk mewujudkan Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan. Arah pembangunan kota ini dilaksanakan dengan memanfaatkan kualitas sumber daya manusia yang sudah mulai meningkat cukup tinggi pada periode pembangunan sebelumnya. Peningkatan penerapan IPTEK ini akan dilakukan di bawah koordinasi Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis, agar kegiatan yang dilakukan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan inovasi dan penggarapan teknologi yang berkaitan dengan pengembangan usaha perdagangan dan jasa. Sejalan dengan hal itu, kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) di bidang lain perlu pula terus dikembangkan, guna mendorong pengembangan Solok sebagai kota yang maju dan modern.

## A. Pembangunan Ekonomi

1. Dalam rangka mewujudkan *Perdagangan yang Efisien dan Berdaya Saing Global*, arah dan sasaran yang perlu dicapai dalam RPJMD ke-3 ini adalah terwujudnya penggunaan teknologi yang lebih baik dan maju dalam kegiatan perdagangan dan pengangkutan barang. Dalam hal ini, perhatian khusus diberikan pada peningkatan penggunaan *Teknologi Informasi* untuk menunjang kegiatan perdagangan dengan alat elektronik (*e-commerce*), yang merupakan kecenderungan umum dalam kegiatan perdagangan modern.
2. Guna mengupayakan *Terwujudnya Usaha Jasa dan Pariwisata yang Profesional dan Bermartabat*, pada tahapan RPJMD ke-3 ini, peningkatan profesionalitas para pengusaha dan tenaga kerja usaha jasa perlu terus diwujudkan. Dengan kesiapan prasarana dan sarana pada RPJMD ke-1 serta didikuti dengan peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan tenaga kerja pada RPJMD ke-2, maka pada tahapan ini, upaya promosi dan pemasaran mulai dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media. Untuk keperluan itu, pemerintah Kota Solok akan memfasilitasi, dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan pameran, baik dalam Provinsi Sumatera Barat maupun di luar Provinsi Sumatera Barat.
3. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Agribisnis Maju*, pada RPJMD ke-3 ini, upaya peningkatan fasilitas kawasan sentra usaha agribisnis yang telah dirintis pada periode RPJMD ke-1 akan terus dilengkapi. Seiring dengan itu, dilakukan pula upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha agribisnis. Dengan demikian, kawasan sentra agribisnis tersebut diharapkan dapat berfungsi dengan baik pada periode RPJMD ke-3 ini, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal.
4. Dalam rangka mewujudkan *Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis*, pada periode RPJMD ke-3 ini, upaya akan difokuskan untuk melengkapi prasarana dan sarana yang diperlukan oleh Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis yang mulai dirintis pendiriannya pada RPJMD ke-1. Sejalan dengan kegiatan itu, dilakukan pula penyiapan mekanisme kerja Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis yang diiringi dengan penyiapan sumber daya manusia para peneliti dan tenaga administrasi yang terlibat dalam pengelolaannya. Dengan demikian, pada RPJMD ke-3 ini, aktivitas pusat ini diharapkan sudah dapat ditingkatkan dengan dukungan sumber daya manusia dan peralatan yang semakin berkualitas.

5. Dalam rangka *Terwujudnya Rumah Sakit Khusus Traumatic Center*, pada periode RPJMD ke-3, konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan dasar dan konsolidasi serta persiapan tenaga medis dan peralatan Rumah Sakit Khusus *Traumatic Center* akan dilakukan, agar siap melayani secara profesional.
6. Agar *Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Perdagangan dan Jasa*, pada periode RPJMD ke-3 ini, perhatian diberikan lebih banyak pada upaya peningkatan peralatan yang lebih maju dan modern serta lanjutan perluasan jaringan dan menara penghubung ke seluruh pelosok kota.

## **B. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia**

1. Untuk dapat mendorong *Terlaksananya Pemerataan Kualitas Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan*, dengan memperhatikan kemajuan yang telah dapat dicapai sampai periode RPJMD ke-2, untuk periode RPJMD ke-3, arah pembangunan kota ditekankan pada lanjutan upaya untuk mewujudkan pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya ini akan dapat dilakukan dengan terus melakukan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan keterampilan yang terkait langsung dengan usaha perdagangan dan jasa. Sejalan dengan hal itu, pendidikan umum juga disiapkan untuk terakreditasi secara nasional.
2. Untuk dapat mengupayakan *Terdapatnya Institusi Pendidikan Keterampilan yang Profesional dan IPTEKS Tepat Guna*, pada periode RPJMD ke-3 ini, pengembangan institusi pendidikan keterampilan terus pula dilakukan melalui peningkatan kualitas peralatan bengkel dan laboratorium, sehingga dapat meningkatkan kualitas IPTEK yang diajarkan di sekolah kejuruan dan di Politeknik yang sudah dapat dibangun pada periode RPJMD sebelumnya. Untuk dapat mendorong terbangunnya IPTEK yang maju dan tepat guna, pada periode RPJMD ke-3 ini, prioritas diletakkan pada teknologi yang diperlukan, diantaranya adalah peralatan laboratorium yang sudah terkomputerisasi. Prioritas diberikan kepada pengaplikasiannya untuk pengembangan perdagangan dan jasa.
3. Dalam rangka *Terwujudnya Pendidikan Bernuansa Islami*, pada periode RPJMD ke-3 ini, sistem sekolah berasrama (*boarding school*) diharapkan sudah mulai dapat dilaksanakan dan diharapkan staf dan kurikulum yang telah disiapkan pada periode sebelumnya mulai dipakai. Dalam periode RPJMD ke-3 ini, upaya peningkatan kualitas staf serta kurikulum juga terus dilakukan.

4. Dalam rangka *Tersedianya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas*, prioritas pembangunan pada periode RPJMD ke-3 ini adalah peningkatan pengadaan peralatan medis yang lebih canggih. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan peralatan dilakukan pula untuk mendukung kegiatan rumah sakit khusus *Traumatic Center*, yang telah dirintis pada periode RPJMD sebelumnya.
5. Guna mendorong *Terwujudnya Generasi Muda yang Profesional*, pada RPJMD ke-3 ini, pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahap ini diarahkan pada upaya untuk melanjutkan pembangunan fisik dan ketenagaan yang sudah dirintis pada periode sebelumnya. Pada tahap ini, Kota Solok diharapkan sudah siap menyelenggarakan kegiatan (*event*) olahraga yang bertaraf nasional.

### **C. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan**

1. Dalam rangka *Terlaksananya Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Demokratis*, arah pembangunan dalam RPJMD ke-3 ini ditekankan pada upaya untuk membangun dan memantapkan sistem pemantau kerawanan konflik politik. Disamping itu, juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
2. Untuk dapat *Terwujudnya Sinergitas Antarpelaku Pembangunan Daerah*, prioritas utama pada RPJMD ke-3 ini diletakkan pada upaya lanjutan untuk penguatan kapasitas dan koordinasi pelaksanaan program antara *Satuan Kerja Perangkat Daerah* (SKPD). Dengan upaya pemantapan koordinasi tersebut, diharapkan sinergitas antarpelaku pembangunan daerah dapat diwujudkan.
3. Guna dapat mewujudkan *Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Beretika, Partisipatif, dan Terpadu*, arah pembangunan pada periode RPJMD ke-3 ini adalah terbangunnya aparatur yang bersih dan bebas KKN. Disamping itu, arah pembangunan juga untuk melanjutkan penerapan teknologi informasi dalam sistem birokrasi. Sejalan dengan itu, peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan terus ditingkatkan dan dimantapkan.
4. Dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Pelayanan Publik Prima*, upaya yang perlu dilakukan dalam periode RPJMD ke-3 ini adalah memantapkan penerapan standar pelayanan minimum dan melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan. Ini merupakan kelanjutan dari upaya yang dilakukan selama RPJMD ke-2, di antaranya melalui sosialisasi dan advokasi, baik melalui diskusi, lokakarya, maupun pelatihan tentang metode dan teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima.

#### D. Pembangunan Agama dan Budaya

1. Dalam rangka *Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Agamais dan Berbudaya*, arah yang perlu diwujudkan dalam periode RPJMD ke-3 ini adalah meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan konsep dan nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan memberikan pencerahan agama dan adat bagi masyarakat umum. Sejalan dengan hal itu, jumlah dan kualitas sarana peribadatan, seperti mesjid, mushala, dan tempat pendidikan agama untuk generasi muda juga akan semakin meningkat dan tersebar di seluruh pelosok kota. RPJMD ke-3 juga ditandai dengan berjalannya kelembagaan dan sistem ZISWAH di Kota Solok.
2. Dalam rangka *Mewujudkan Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia*, arah pembangunan daerah pada RPJMD ke-3 ini adalah lanjutan upaya pada RPJMD ke-1 dan RPJMD ke-2, yakni mewujudkan peningkatan budi dan akhlak masyarakat melalui peningkatan pendidikan moral untuk generasi muda. Sejalan dengan hal tersebut, pembunuhan, pencurian, penipuan, perkelahian, korupsi, pelecehan seksual, penggunaan narkoba, dan tindakan amoral lainnya dalam masyarakat sudah semakin berkurang, sehingga generasi muda dapat mengambil contoh konkrit tentang masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Pemberian sanksi yang tegas dan berat bagi para pelaku terus dilakukan karena merupakan faktor kunci yang perlu dilaksanakan secara konsekuen.
3. Untuk mewujudkan *Kegiatan Ekonomi Menuju Keseimbangan Syariah dan Konvensional*, pada RPJMD ke-3 ini, upaya pembangunan dilakukan dalam bentuk pengembangan penerapan IPTEK tepat guna, yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tersebut. Dalam hal itu, perbaikan penerapan teknologi produksi dan teknologi informasi guna menunjang kegiatan ekonomi syariah perlu diberikan perhatian utama.
4. Dalam rangka mewujudkan *Terlaksananya Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah secara Profesional*, pada RPJMD ke-3 ini, perhatian lebih banyak diberikan pada peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pelayanan kepada pemberi dan penerima zakat perlu pula diupayakan secara terus-menerus, sehingga pengelolaannya berjalan dengan baik dan pihak pemberi dan penerima zakat menjadi lebih puas.



5. Agar dapat *Terciptanya Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Suasana Multikultur*, pada tahap RPJMD ke-3 ini, terus melanjutkan upaya revitalisasi budaya Minangkabau melalui kegiatan pendidikan untuk generasi muda. Sejalan dengan itu, gerakkan untuk selalu bangga memiliki dan menjunjung tinggi kebudayaan Minangkabau telah berjalan dengan baik. Adapun wujud dari revitalisasi adalah berfungsinya kelembagaan yang mampu mengembangkan kebudayaan Minangkabau.

#### **E. Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan**

1. Dalam Rangka mewujudkan *Tersedianya Prasarana dan Sarana Perdagangan dan Jasa yang Berkualitas*, pada periode RPJMD ke-3 ini, kualitas sumber daya manusia pengelola pasar, hotel, restoran, dan lembaga keuangan terus ditingkatkan. Disamping itu, penggunaan teknologi pendukung diharapkan juga dapat meningkat.
2. Dalam rangka mengupayakan *Tersedianya Prasarana dan Sarana Perhubungan yang Berkualitas*, kegiatan pembangunan dalam masa RPJMD ke-3 ini adalah bersifat lanjutan dari kegiatan pembangunan yang telah dimulai pada masa RPJMD ke-2. Prioritas pembangunan yang dilakukan pada periode ini adalah dalam bentuk peningkatan kualitas dan lebar jalan yang sesuai dengan standar teknis perencanaan. Pada periode ini, seluruh ruas jalan yang ada diharapkan sudah dibangun dengan konstruksi aspal beton atau campuran aspal panas (*hotmix*).
3. Dalam rangka mengupayakan *Tersedianya Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Berkualitas*, pada periode RPJMD ke-3 ini, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan perlu terus dilanjutkan. Dengan prasarana dan sarana yang memadai tersebut, diharapkan Kota Solok menjadi daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, baik bagi warga Kota Solok maupun bagi warga sekitar kota.
4. Guna dapat *Tersedianya Utilitas Kota yang Memadai*, pada tahapan RPJMD ke-3 ini, prioritas pembangunan diarahkan pada kelanjutan dan pemantapan dari kegiatan yang dilakukan pada masa RPJMD ke-2, yaitu berupa perluasan pemasangan jaringan distribusi yang menjangkau seluruh wilayah kota. Sejalan dengan hal tersebut, penggantian peralatan tenaga listrik dan air minum tersebut dilakukan pula dengan model dan jenis yang lebih maju, sehingga pelayanan menjadi lebih baik.

5. Pada RPJMD tahap ke-3, dalam rangka mengupayakan *Terwujudnya Sistem Pengelolaan Tanah Ulayat untuk Menjamin Kepastian Hukum*, pemanfaatan tanah ulayat dilakukan sesuai dengan potensi ekonomi ataupun potensi sosialnya dengan menggunakan sistem pemanfaatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta mampu menjaga keberadaan tanah ulayat agar tetap eksis. Untuk terselenggaranya rencana ini dengan baik, pemuka adat, baik yang berada dalam lembaga kerapatan adat, suku, maupun kaum, dapat didampingi oleh lembaga pendamping yang memenuhi persyaratan untuk itu.

#### **F. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

1. Guna dapat *Terwujudnya Tata Ruang Wilayah yang Dilaksanakan secara Konsisten*, pada RPJMD periode ke-3 ini, tekanan diberikan pada pemantapan pengawasan dan penerapan RTRW yang diiringi dengan pengenaan sanksi yang tegas dan keras terhadap pelanggaran ketentuan tata ruang. Dalam masa ini, revisi akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen tata ruang, guna mengantisipasi perubahan yang terjadi di lapangan. Evaluasi dan revisi juga dilakukan terhadap rencana induk tiap-tiap sektor untuk menghasilkan rencana yang lebih realistis.
2. Guna mewujudkan *Tata Kelola Lingkungan yang Baik*, pada periode RPJMD ke-3 ini, prioritas diberikan pada perbaikan peningkatan peralatan yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti peralatan laboratorium dan pengetesan pencemaran. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas tenaga teknis pengelolaan lingkungan hidup juga terus dilanjutkan agar kemampuan teknis pengelolaan menjadi semakin baik.
3. Guna dapat mewujudkan *Perilaku Sadar Lingkungan*, prioritas pada periode RPJMD ke-3 ini adalah pada upaya untuk terus melanjutkan kegiatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang sadar lingkungan untuk seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas sistem tanggap darurat dilakukan pula untuk mengatasi dan menanggulangi dampak negatif bencana alam, dengan menggunakan peralatan teknologi yang lebih maju dan modern.
4. Untuk dapat *Terwujudnya Kota yang Bersih, Hijau, dan Nyaman*, melanjutkan pelaksanaan reboisasi dan penghijauan melalui penanaman pohon pelindung dan pembangunan taman dan jalur hijau sampai ke pemukiman penduduk. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan lindung ini, berbagai lomba taman lingkungan diadakan pula.

5. *Guna Terwujudnya Penataan Lokasi Sektor Informal*, pada tahap RPJMD ke-3 ini, perhatian terutama, diberikan pada lanjutan pembangunan fasilitas kios-kios sederhana untuk para pengusaha sektor informal. Sejalan dengan hal tersebut, penyediaan energi listrik, air minum, dan penggunaan peralatan yang lebih baik, termasuk fasilitas teknologi informasi, dilakukan pula, sehingga pengusaha sektor informal tersebut akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggannya.

#### **D. RPJMD Ke-4 (2021-2025)**

##### **Arah Umum**

Berdasarkan hasil yang dapat diperoleh selama pelaksanaan tiga periode RPJMD sebelumnya, pada akhir periode RPJMD ke-4 ini, visi yang ditetapkan dalam RPJPD ini, yaitu mewujudkan Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan, diharapkan sudah dapat diwujudkan secara sempurna. Kondisi Kota Solok yang demikian ditandai oleh berkembangnya kota ini sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa dan pendidikan, baik untuk kegiatan lokal, untuk Provinsi Sumatera Barat, maupun untuk regional Sumatera Bagian Tengah. Pengembangan kota ini dilandasi pula oleh penerapan ajaran agama dan budaya yang sudah sangat baik, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Kondisi kota yang demikian juga didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi dan tata pemerintahan yang baik. Demikian pula halnya, kondisi lingkungan hidup sudah cukup baik, bersih, bebas polusi, menyenangkan, dan berkelanjutan.

##### **A. Pembangunan Ekonomi**

1. Pada periode RPJMD ke-4 ini, arah pembangunan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan yang efisien dan berdaya saing global diharapkan sudah akan dapat dicapai. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan jasa tersebut diharapkan sudah dapat berkembang dengan lancar dan efisien, sehingga dapat dilakukan secara baik, profesional, dan mampu bersaing, baik di dalam maupun di luar daerah.
2. Pada periode RPJMD ke-4 ini, arah pembangunan untuk mewujudkan usaha jasa dan pariwisata yang profesional dan bermartabat diharapkan juga sudah akan dapat diwujudkan. Dengan adanya kegiatan jasa yang profesional tersebut, Kota Solok akan semakin tumbuh cepat dan berdaya saing tinggi.

3. Pada periode RPJMD ke-4 ini, pengembangan usaha agribisnis maju, efisien dan berdaya saing tinggi diharapkan sudah dapat diwujudkan dengan baik. Dengan demikian, usaha agribisnis yang meliputi pengolahan dan pemasaran produk pertanian sudah akan dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan mempunyai daya saing global, sehingga mampu menempuh pasaran nasional dan internasional.
4. Pada periode RPJMD ke-4 ini, pembangunan *Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis* di Kota Solok sudah akan dapat diwujudkan dan dapat beroperasi secara baik dan lancar. Namun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia para peneliti perlu terus ditingkatkan, agar Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis ini menjadi sangat produktif dan tumbuh cepat. Dengan demikian, peningkatan teknologi berikut penciptaan produk-produk baru diharapkan sudah akan dapat dilakukan secara rutin.
5. Pada periode RPJMD ke-4 ini, sebagian penyakit utama sudah dapat dituntaskan dan juga sudah terwujud adanya Rumah Sakit *Traumatic Center* yang terakreditasi dan menjadi rujukan di Sumatera Bagian Tengah.
6. Pada periode RPJMD ke-4 ini, fasilitas telekomunikasi yang cukup, berkualitas, dapat menjangkau seluruh pelosok kota, dan mampu mendukung kegiatan Perdagangan, Jasa dan Pendidikan diharapkan sudah tersedia.

## **B. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia**

1. Sebagai hasil dari pembangunan selama periode RPJMD ke-1 sampai dengan RPJMD ke-3, pada akhir periode RPJMD ke-4, arah pembangunan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan diharapkan sudah akan dapat diwujudkan. Kondisi ini ditandai dengan sudah tercapainya IPM sesuai dengan standar negara maju, yang didukung pula oleh menurunnya angka kematian bayi, semakin baiknya kualitas pendidikan, dan meningkatnya daya beli masyarakat.
2. Pada periode RPJMD ke-4 ini, seluruh institusi pendidikan di kota Solok untuk semua jenjang, termasuk pendidikan keterampilan, diharapkan sudah terakreditasi dengan baik dan memenuhi standar nasional. Khusus untuk institusi pendidikan keterampilan, pada tahap ini, ia diharapkan sudah menghasilkan tenaga yang mampu bekerja dan siap bekerja serta mampu bersaing di mana saja, termasuk ke mancanegara. Kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka

penerapan teknologi tepat guna dan penciptaan produk-produk baru sudah semakin meningkat. Di samping itu, hasil dari penerapan teknologi ini sudah semakin banyak pula yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung visi Kota Solok sebagai kota Perdagangan, Jasa dan Pendidikan.

3. Pada Periode RPJMD ke-4 ini, pendidikan bernuansa Islami, terutama pendidikan yang menerapkan sistem *boarding school* dengan standar internasional diharapkan telah dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik.
4. Di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, pada periode RPJMD ke-4 ini, pelayanan prima untuk segenap lapisan masyarakat diharapkan telah terwujud. Pada tahap ini, pelayanan kesehatan sudah dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga dokter dan paramedis yang berkualitas tinggi dan profesional serta didukung oleh peralatan yang lengkap dan berkualitas baik. Di samping itu, rumah sakit khusus *Traumatic Center* yang telah dibangun di daerah ini sudah semakin berkembang dan menjadi rumah sakit rujukan untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah.
5. Kegiatan kepemudaan pada tahap akhir ini adalah menjadikan pemuda yang lahir dan berkembang di kota Solok siap memberikan kontribusinya dalam membangun Kota Solok, karena institusi yang disediakan diharapkan mampu mempersiapkan mereka menjadi profesional. Selain itu, tingkat kejahatan dapat ditekan serendah mungkin, bahkan Kota Solok dapat menjadi kota percontohan dalam pembangunan kepemudaan.

### **C. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan**

1. Pada periode RPJMD ke-4 ini, upaya pembangunan tata pemerintahan dan hukum yang baik sudah akan dapat dicapai. Kondisi ini ditandai dengan terlaksananya tata pemerintahan yang berlandaskan hukum yang dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, warga kota tidak ada lagi yang merasa tidak terlindungi oleh hukum. Pemerintah juga melandasi semua kegiatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara konsekuen.
2. Pada periode RPJMD ke-4 ini, sinergitas antarpelaku pembangunan kota, baik antara SKPD, pemerintah, dan swasta, maupun antara pemerintah dan masyarakat umum diharapkan sudah akan dapat terwujud dengan baik. Kondisi ini ditandai dengan semakin terpadunya proses pembangunan kota, sehingga pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan warga kota akan semakin meningkat dan terlaksana secara efisien.

3. Sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan semula, pada tahap RPJMD ke-4 ini, tata pemerintahan kota yang beretika, partisipatif dan terpadu sudah akan dapat terwujud dengan baik. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya produktivitas dan kinerja aparatur, sehingga pelayanan yang diberikan dapat menjadi lebih baik. Selain itu, proses dan hasil pembangunan kota yang sesuai dengan aspirasi dan keinginan warga kota secara keseluruhan akan dapat diwujudkan. Di samping itu, rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan sudah cukup tinggi, sehingga mereka memelihara dan melindungi hasil pembangunan yang telah dapat dicapai oleh Kota Solok secara bersama-sama.
4. Sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah, pada periode RPJMD ke-4 ini, pelayanan publik yang prima diharapkan sudah akan dapat diwujudkan. Kondisi ini ditandai dengan terdapatnya pelayanan publik yang cepat, tepat arah, dan efisien, sehingga dapat memuaskan seluruh lapisan masyarakat. Keluhan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Solok sudah hampir tidak ada sama sekali.

#### **D. Pembangunan Agama dan Budaya**

1. Pada tahap RPJMD ke-4 ini, upaya yang dilakukan pada periode RPJMD ke-3 masih dapat terus dilanjutkan, sehingga terwujud *Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamais dan Berbudaya*. Kondisi ini ditunjukkan oleh sudah terlaksananya penerapan ajaran agama secara baik dan berkualitas, yang terlihat dalam tingkah laku dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
2. Pada tahap RPJMD ke-4 ini, upaya untuk meningkatkan moral dan akhlak mulia masyarakat sudah akan dapat terwujud secara sempurna. Kondisi ini ditandai dengan telah terdapatnya tingkat laku masyarakat yang bermoral tinggi dan bermartabat, yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya daerah.
3. Pada tahap terakhir (RPJMD ke-4) ini, keseimbangan praktek ekonomi syari'ah dan konvensional diharapkan sudah akan dapat diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari warga Kota Solok. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya keadilan dalam pengelolaan usaha, tidak melakukan penipuan dan pemerasan, dan terdapatnya pola pengembangan usaha yang tidak merugikan orang lain. Walaupun kegiatan ekonomi modern juga berkembang, seperti swalayan besar

(mall) dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang datang dari luar daerah, keberadaannya tidak merugikan pengusaha kecil milik pribumi.

4. Pada periode RPJMD ke-4 ini, pengelolaan zakat dan pendistribusiannya diharapkan sudah dapat dilaksanakan secara baik, sesuai dengan ketentuan agama Islam. Kondisi ini ditandai dengan telah tercapainya pengumpulan zakat sebesar 80% dari wajib zakat. Di samping itu, pendistribusiannya sudah dapat dilakukan secara lancar kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Dengan cara demikian, jumlah penduduk miskin menjadi semakin kecil dari jumlah keseluruhan warga kota Solok, dan kesejahteraan masyarakat secara umum sudah jauh meningkat.
5. Pada tahap terakhir ini, kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multikultur direncanakan telah terwujud dengan baik. Realitas multikultur dijadikan modal sosial bagi kekuatan pembangunan daerah. Dalam tata kehidupan, realitas multikultur telah dianggap alamiah dan wajar dalam pola pikir dan perilaku masyarakat Kota Solok. Penekanan pada tahap ini adalah penguatan dan pemanfaatan keanekaragaman sosial budaya melalui berbagai ruang gerak pembangunan. Masyarakat telah terbiasa dengan model pembangunan dan pengembangan jati diri berdasarkan kebanggaan pada multikultur. Pada tahap ini, perbedaan persepsi tentang keanekaragaman tidak ada lagi, kecuali membangun kesadaran yang sama, bahwa perbedaan adalah kekuatan sosial dan bukan penghalang bagi persatuan daerah.

#### **E. Pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan**

1. Pada periode RPJMD ke-4 ini, penyediaan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa yang berkualitas sudah dapat diwujudkan. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa, yang bukan hanya melayani warga Kota Solok dan hinterland Kota Solok, namun juga sudah dapat melayani masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Tengah.
2. Sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan semula, pada tahap RPJMD ke-4 ini, penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang berkualitas sudah dapat diwujudkan. Dalam periode ini, seluruh wilayah kota diharapkan sudah dapat diakses melalui jaringan jalan yang baik, sehingga tidak ada lagi wilayah yang terisolasi. Sementara itu, seluruh jaringan jalan yang ada sudah memenuhi standar yang berlaku secara nasional, baik konstruksi

maupun lebarnya, sehingga kemacetan yang selama ini terjadi sudah dapat diatasi.

3. Pada periode RPJMD ke-4 ini, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas sudah dapat diwujudkan. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan yang tersedia, bukan hanya melayani warga Kota Solok dan hinterland Kota Solok, namun juga sudah dapat melayani masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Tengah. Dengan demikian, diharapkan Kota Solok sudah dapat menjadi kota pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan semula, pada tahap RPJMD ke-4 ini, penyediaan utilitas kota yang memadai sudah dapat diwujudkan. Energi listrik, telepon dan air bersih sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan tersebar ke seluruh pelosok kota. Disamping itu, penerangan jalan umum sudah mampu melayani seluruh wilayah kota. Pemasangan lampu jalan, di samping berfungsi sebagai alat penerangan, juga berfungsi sebagai keindahan kota di malam hari, sehingga kegiatan dan keramaian kota masih dapat dilaksanakan pada malam hari. Demikian juga dengan air bersih, pada periode RPJMD ke-4 ini ditekankan pada pemasangan saluran pipa air bersih yang mampu melayani sekitar 90% dari penduduk kota, dengan layanan air bersih selama 24 jam. Di samping itu, pelayanan oleh PDAM Kota Solok dalam penyediaan air bersih juga sudah dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pada periode RPJMD ke-4 ini, sistem pengelolaan tanah ulayat untuk menjamin kepastian hukum sudah dapat diwujudkan. Sesuai dengan arah pembangunan, pada tahap RPJMD ke-4 ini, upaya pelestarian tanah ulayat dilakukan dengan membangun pola kemitraan antara tiga unsur utama, yaitu pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pola ini dapat diwujudkan apabila ketiga unsur itu dapat menjaga komitmen di dalam upaya mempertahankan tanah ulayat sebagai bagian dari pelestarian budaya Minangkabau.

#### **F. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

1. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan *Tata Ruang Wilayah yang Dilaksanakan secara Konsisten*, pada RPJMD periode ke-4 ini, seluruh dokumen Rencana Tata Ruang telah selesai direvisi. Begitu juga, Rencana Induk Sektorial juga telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Pelaksanaan pembangunan sudah



mengikuti RTRW yang ada. Sementara, pengawasan dan pengendalian tata ruang semakin ditingkatkan, sehingga pelaksanaan pembangunan lebih tertib dalam memanfaatkan ruang yang tersedia. Dalam masa itu, masyarakat sudah menyadari arti dari pembangunan berwawasan tata ruang. Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota sudah terwujud dengan baik dan teratur. Aktivitas pembangunan akan berjalan dengan tertib dan lancar dan penegakan hukum terhadap tata ruang makin konsisten dan sistem sanksi dan hadiah (*reward*) tetap dikembangkan. Dengan demikian, pembangunan yang serasi, efektif dan efisien serta berwawasan tata ruang dapat diwujudkan.

2. Dalam rangka mewujudkan *Tata Kelola Lingkungan yang Baik*, fokus pembangunan pada RPJMD ke-4 dilakukan melalui upaya peningkatan pengendalian kualitas lingkungan hidup. Sejalan dengan upaya tersebut, pengendalian terhadap kualitas air dan udara makin ditingkatkan, karena intensitas pembangunan semakin meningkat. Pada tahap ini, prasarana dan sarana untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik sudah terwujud dan dilengkapi dengan peralatan yang lebih mutakhir. Sementara, sistem penanganan bencana alam dievaluasi untuk kemudian dilakukan penyempurnaan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitasnya. Di samping itu, jumlah dan kualitas aparatur yang bertugas untuk penanggulangan bencana alam tersebut sudah semakin banyak, dengan kualitas dan keterampilan yang lebih baik. Dengan demikian, tata kelola lingkungan yang baik sudah dapat diwujudkan.
3. Dalam rangka mewujudkan *Perilaku Sadar Lingkungan*, pada periode RPJMD ke-4 ini, upaya untuk melakukan penyuluhan masyarakat tentang sadar lingkungan terus dilakukan dan ditingkatkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Pada periode ini, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan diharapkan sudah baik dan pola penyuluhan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang sudah sadar lingkungan. Hal itu merupakan salah satu unsur penting untuk dapat mewujudkan kualitas lingkungan yang baik, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
4. Untuk dapat *Terwujudnya Kota yang Bersih, Hijau, dan Nyaman* seperti telah ditetapkan, pada RPJMD ke-4 ini, perlindungan terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan dilakukan secara lebih intensif, sehingga tercipta suatu kawasan yang asri dan hijau dengan ekosistem yang terjaga baik. Seluruh kawasan kota sudah dilengkapi dengan jalur hijau, pohon pelindung, dan taman. Pada tahapan ini, ruang terbuka hijau direncanakan sudah dibangun sebesar 30% dari luas kota.

5. Pada periode RPJMD ke-4 ini, arah pembangunan untuk mewujudkan *penataan lokasi sektor informal* dengan baik dan berkualitas diharapkan sudah akan dapat diwujudkan. Dengan demikian, pengembangan sektor informal akan dapat terus didorong untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat yang tertata dengan baik dan tidak merusak kebersihan dan keindahan kota.

Untuk dapat memberikan gambaran lebih rinci dan sistematis, tetapi ringkas, kepada para pelaku pembangunan daerah dan unsur lain yang berkepentingan, Tabel 5.1 berikut ini memberikan *Matriks Arah dan Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok 2005-2025*. Melalui matriks ini, uraian konkrit dan rinci tentang pentahapan pembangunan untuk tiap-tiap periode pembangunan lima tahunan (RPJMD) dari setiap arah pembangunan jangka panjang dapat dilihat.